

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SESUAI PERMEN PAN-RB
NOMOR 6 TAHUN 2022**
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang)

SKRIPSI



Oleh

ANDRE ERLANGGA TRI ROHMANSYAH

NIM : 19520102

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SESUAI PERMEN PAN-RB
NOMOR 6 TAHUN 2022**

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

ANDRE ERLANGGA TRI ROHMANSYAH

NIM : 19520102

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SESUAI PERMEN PAN-RB NOMOR 6
TAHUN 2022
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Malang)**

SKRIPSI

Oleh

ANDRE ERLANGGA TRI ROHMANSYAH

NIM : 19520102

Telah Disetujui Pada Tanggal 14 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

NIP. 197710252009012006

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SESUAI PERMEN PAN-RB NOMOR 6
TAHUN 2022

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Malang)

SKRIPSI

Oleh

ANDRE ERLANGGA TRI ROHMANSYAH

NIM : 19520102

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

NIP. 19751030201608012048

2 Anggota Penguji

Dyah Febriantina Istiqomah, M.Sc

NIP. 198702192019032009

3 Sekretaris Penguji

Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

NIP. 197710252009012006

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andre Erlangga Tri Rohmansyah
NIM : 19520102
Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SESUAI PERMEN PAN-RB NOMOR 6 TAHUN 2022 (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG)

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing maupun fakultas ekonomi tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Malang, 26 Juni 2023

Hormat Saya,



Andre Erlangga Tri R.

NIM : 19520102

HALAMAN MOTTO

Sepiro gedhene sengsoro yen tinompo amung dadi cobo.
“Seberapa besarnya kesengsaraan jika ikhlas menerimanya maka hanya akan
menjadi sekedar cobaan”.

~Persaudaraan Setia Hati Terate

Dadio manungsa kang ana guna lan manfaate.
“Jadilah manusia yang bisa berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar”

~Persaudaraan Setia Hati Terate

Jer besuki mawa beya.
“Semua kesuksesan harus ada sebuah pengorbanan”

~Persaudaraan Setia Hati Terate

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan seluruh alam. Atas berkat rahmat, ketetapan, dan ridho Allah SWT sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua

Ibu Rokayati Ningsih dan Bapak Fatkur Rohman

Terimakasih atas doa dan dukungan serta motivasi selama ini, terimakasih juga sudah senantiasa merawat, menjaga, dan membimbing saya dengan sabar dan ikhlas hingga saya bisa berada di titik ini. Tanpa kasih sayang dan perhatiannya, mustahil bagi saya untuk bisa menjalani kehidupan ini.

Kakak

Novia Nur Rohma

Terimakasih atas doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga doa dan semua hal baik yang saya dapatkan, semoga menyertai untuk kakak dan adik saya. Maaf jika belum bisa menjadi adik yang baik.

Dosen Pembimbing

Bu Yona Octiani SE, M.SA

Terima kasih banyak atas segala arahan, bantuan, pelajaran dan kesabaran dalam membimbing saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu selalu disertai hal-hal baik.

Dosen Fakultas Ekonomi

Terimakasih telah memberikan wadah bagi saya untuk bisa berkembang dan mengenyam ilmu untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Serta Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dan memberikan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sesuai Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.E.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, S.E., M.Bus., Ak., CA, M.Res., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Fadlil Abdani, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai Dosen Wali.
5. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing serta memberikan motivasi dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Ibu, Bapak, Kakak dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa serta dukungan secara moral dan spiritual.
8. Hilda Shintia Amelia Putri yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Keluarga besar PSHT UIN Malang yang selalu memberikan dukungan positif serta membawa keceriaan dan kegembiraan.
10. Keluarga besar Tax Center UIN Malang, Kastakopi Malang dan seluruh anggota PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Teman-teman akuntansi 2019 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamin yaa Robbal ‘Aalamiin.

Malang, 26 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	22
2.2.1 Akuntabilitas	22
2.2.2 <i>Good Governance</i>	29
2.2.3 Kinerja	32
2.2.4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	36
2.2.5 Akuntabilitas dalam perspektif islam	38
2.2.6 Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022	40
2.2.7 Kerangka Konseptual.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Subjek Penelitian.....	44
3.4 Data dan Jenis Data	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Observasi	46
3.5.2 Wawancara.....	47
3.5.3 Dokumentasi	48
3.6 Analisis Data	48
3.7 Keabsahan Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.1 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang	53
4.1.2 Tugas dan fungsi KPKNL Malang	54
4.1.3 Struktur organisasi KPKNL Malang.....	57
4.1.4 Wilayah kerja KPKNL Malang	58
4.1.5 Rincian Pegawai KPKNL Malang	59
4.1.6 Pembuatan lakip.....	60
4.1.7 Kinerja Karyawan saat Covid-19.....	61
4.2 Data Hasil Penelitian	62
4.2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	62
4.2.2 Perbandingan Hasil Akuntabilitas Kinerja 2019-2022	91
BAB V PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Persentase Hasil Lelang	7
Tabel 1. 2 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 2. 2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4. 1 Rincian Pegawai KPKNL	59
Tabel 4. 2 Rincian Pegawai KPKNL	59
Tabel 4. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama	64
Tabel 4. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama	68
Tabel 4. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama	74
Tabel 4. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama	78
Tabel 4. 7 Capaian Indikator Kinerja	82
Tabel 4. 8 Analisis Akuntabilitas Kinerja	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPKNL Malang	57
Gambar 4.2 Wilayah Kerja KPKNL Malang	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis	105
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	107
Lampiran 3 Dokumentasi.....	112
Lampiran 4 Hasil Turnitin.....	113
Lampiran 5 Jurnal Bimbingan Skripsi.....	114
Lampiran 6 Surat Keterangan Survey/Riset/PKL	115

ABSTRAK

Andre Erlangga Tri Rohmansyah. 2023, SKRIPSI. Judul : “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Permen pan-rb nomor 6 tahun 2022 (studi kasus pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang)”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

Kata Kunci : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja, Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari bagaimana suatu instansi pemerintah menjalankan tugasnya serta untuk mempertanggungjawabkan pencapaian atau kegagalan upaya misi organisasi dan dibuat serta disusun secara berkala. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah instansi yang bergerak pada kepengurusan aset negara, namun dengan adanya beberapa indikator kinerja yang tidak memenuhi target membuat penulis tertarik untuk meneliti pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang, disisi lain peneliti juga ingin tau bagaimana pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kantor tersebut, oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai permen pan-rb nomor 6 tahun 2022 (studi kasus pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi secara langsung pada objek penelitian, hal ini bertujuan agar penulis dapat dengan mudah menganalisis mengenai laporan akuntabilitas kinerja selama 4 tahun terakhir. Wawancara juga dilakukan dalam penelitian ini karena penulis dapat menggali informasi dengan lebih rinci dan detail sehingga dapat memperkuat hasil akhir penelitian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang telah melakukan pelaporan akuntabilitas kinerja secara baik setiap tahunnya meskipun masih adanya indikator kinerja yang tidak mencapai target yang disebabkan oleh beberapa faktor dan hasil yang tidak konsisten dalam capaian kinerja setiap tahunnya atau mengalami fluktuatif.

ABSTRACT

Andre Erlangga Tri Rohmansyah. 2023, *THESIS*. Title : “*Analysis of Government Agency Performance Accountability Reports (LAKIP) in accordance with Pan-RB Regulation number 6 of 2022 (a case study at the Malang state property and auction service office)*”

Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

Keyword : *Government Agencies Performance Accountability Report, Performance, Accountability*

Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) is an embodiment of how a government agency carries out its duties and is responsible for achieving or failing the efforts of the organization's mission and is prepared and compiled periodically. The Malang State Property and Auction Service Office is an agency engaged in the management of state assets, but with several performance indicators that do not meet the target, the author is interested in researching the Malang State Property and Auction Service Office. On the other hand, researchers also want to know how accountability reports are implemented. the performance of government agencies in the office, therefore the author took the research title "Analysis of Government Agencies Performance Accountability Reports (LAKIP) according to the pan-rb ministerial regulation number 6 of 2022 (case study on state property service offices and Malang auctions)".

This research uses a qualitative approach by making direct observations on research objects, it is intended that the authors can easily analyze performance accountability reports for the last 4 years. Interviews were also conducted in this study because the authors were able to dig up more detailed and detailed information so that they could strengthen the final results of the research.

From the results of the research that has been done, it can be concluded that the state property service office and auction have reported performance accountability properly every year even though there are still performance indicators that do not reach the target caused by several factors and inconsistent results in performance achievements each year or fluctuate.

خلاصة

أندريه إرلانجا تري رومانسيه. 2023 ، البحث العلمي. العنوان: "تحليل تقرير مساءلة أداء الوكالات الحكومية (lakip) وفقا للائحة Pan-rb رقم 6 لعام 2022 (دراسة حالة في مكتب خدمات الثروة والمزادات بولاية مالانج)"

المشرف : يونا أوكتياني ليستاري،

الكلمات الرئيسية : تقرير مساءلة أداء الوكالات الحكومية ، الأداء ، المساءلة

تقرير مساءلة أداء الوكالات الحكومية (lakip) هو مظهر من مظاهر كيف تؤدي الجهة الحكومية واجباتها ومحاسبة تحقيق أو فشل جهود مهمة المنظمة ويتم إنشاؤها وتجميعها بشكل دوري. مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية مالانج هو وكالة تعمل في إدارة أصول الدولة ، ولكن مع العديد من مؤشرات الأداء التي لا تفي بالهدف تجعل المؤلف مهتما بالبحث في مكتب خدمة الثروة والمزادات في ولاية مالانج ، من ناحية أخرى يريد الباحثون أيضا معرفة كيفية تنفيذ تقارير المساءلة عن أداء الوكالات الحكومية في المكتب ، لذلك يأخذ المؤلف عنوان البحث "تحليل تقرير المساءلة أداء الوكالات الحكومية (lakip) وفقا للائحة عموم Pan-rb رقم 6 لعام 2022 (دراسة حالة في مكتب خدمات الثروة والمزادات بولاية مالانج)".

يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا من خلال إبداء ملاحظات مباشرة على موضوع البحث ، وهذا يهدف إلى جعل المؤلف يستطيع بسهولة تحليل تقارير مساءلة الأداء لآخر 4 سنوات. كما أجريت مقابلات في هذا البحث لأن المؤلف يمكنه استكشاف المعلومات بمزيد من التفصيل والتفصيل لتعزيز النتائج النهائية للبحث.

من نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يمكن استنتاج أن مكتب خدمات الثروة والمزادات الحكومية يقوم بالإبلاغ عن مساءلة الأداء الجيد كل عام على الرغم من أنه لا تزال هناك مؤشرات أداء لا تصل إلى الهدف الناجم عن عدة عوامل ونتائج غير متسقة في إنجازات الأداء كل عام أو تتقلب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1998-an masyarakat dinegara Indonesia mengalami perubahan yang besar dan cukup mendasar dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kemauan untuk diterapkannya akuntabilitas dan transparansi kinerja pada pengelolaan sektor publik. Perubahan tersebut memunculkan ungkapan *good and clean governance* yang bisa diartikan sebagai perwujudan indikator kejujuran pemerintah. Dalam kurun waktu berapa tahun kebelakang kejujuran dari pemerintah lebih dianggap sebagai stabilitas pemerintah akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, kejujuran dianggap sebagai *good governance* atau pemerintahan yang bersih.

Suatu pemerintahan yang bersih atau *good governance* bisa dilihat dan diamati dari tiga pilar yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan, dimana elemen tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintah yang baik haruslah berpartisipasi dalam menangani kebutuhan dari masyarakat yang dipimpinnya, pemerintah juga harus terbuka dalam menjalankan tugas agar semua pihak yang terkait dalam pemerintah dapat berkontribusi secara baik. Dengan begitu pemerintah dituntut untuk selalu berjalan dengan transparan dan pelaksanaan pemerintah tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan. kewajiban pengusaha untuk melaksanakan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat kita (Rochayatun et al. 2023).

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki menjadi pertimbangan utama bagi akuntan, kepala eksekutif, manajer, pembuat kebijakan dan masyarakat (Putra, Yati, and Wahyuni 2015). Menurut Mardiasmo, *Good governance* adalah konsep pendekatan yang berfokus pada pembangunan dalam sektor publik dan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Selanjutnya menurut pendapat dari Sukrisno Agoes menyatakan bahwa *Good Governance* yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan peran direksi pemegang saham, peran dewan komisaris dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola pemerinytahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Selain itu ada juga pendapat menurut *United Nation Development Program* (UNDP) yang memberikan definisi dari *good governance* yang lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan Negara. Dapat dilihat bahwa pengertian yang dikemukakan oleh *World Bank* lebih berfokus pada cara pemerintahan dalam mengelola aspek ekonomi dan aspek sumber daya sosial untuk kepentingan pembangunan masyarakat, selain itu menurut UNDP mengatakan bahwa memfokuskan pada beberapa aspek yaitu aspek politik, administratif dalam pengelolaan negara dan aspek ekonomi (Meidina, 2018).

Kewajiban lembaga pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sudah diamanatkan dalam Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (AKIP) yang diganti dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKIP). Bersumber pada amanat tersebut segala lembaga pemerintah

di tingkatan pusat serta wilayah dari entitas (lembaga) paling tinggi sampai unit kerja setingkat eselon II, tiap tahun wajib mengantarkan data kinerjanya kepada unit kerja yang terletak pada tingkatan lebih besar secara berjenjang.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) membagikan penjelasan jika akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban sesuatu lembaga pemerintah buat mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan penerapan misi organisasi dalam menggapai tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan melalui perlengkapan pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan mencermati penanda kinerja, yang ialah dimensi kuantitatif serta kualitatif yang menggambarkan tingkatan pencapaian sesuatu sasaran atau tujuan yang sudah diresmikan dengan memikirkan penanda masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*process*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), serta akibat (*impac*).

1. *Input*, merupakan tolok ukur kinerja bersumber pada tingkatan ataupun besarnya sumber dana, sumber energi manusia, material, waktu, teknologi, serta sebagainya yang digunakan buat melakukan program serta ataupun kegiatan.
2. *Output*, merupakan tolok ukur kinerja bersumber pada produk (benda ataupun jasa) yang dihasilkan dari program ataupun aktivitas cocok dengan masukan yang digunakan.
3. *Outcome*, merupakan tolok ukur kinerja bersumber pada tingkatan keberhasilan yang bisa dicapai atas keluaran program ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan.

4. *Benefit*, merupakan tolok ukur kinerja yang bersumber pada tingkatan kemanfaat yang dapat dialami selaku nilai tambah untuk warga serta pemerintah daerah dari hasil.
5. *Impac*, merupakan tolok ukur kinerja yang bersumber pada akibatnya terhadap keadaan makro yang mau dicapai dari manfaat.

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Akuntansi sektor publik bisa diartikan sebagai bidang akuntansi yang dalam hal ini khusus membahas mengenai penggunaan akuntansi dalam kegiatan-kegiatan sektor publik. Secara menyeluruh, sektor publik berisi tentang lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, perusahaan negara yang biasa disebut dengan BUMN dan BUMD dinegara Indonesia, partai politik dan yayasan atau lembaga non profit lainnya (Warsini, 2009).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah kegiatan dimana sebagai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Sesuai Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Permen PAN-RB) tahun 2022, yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Tujuan dilaksanakannya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dalam rangka meningkatkan

pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Padia Aulia Hadiyanti ditahun 2017 yang berjudul analisis laporan akuntabilitas kinerja pada dinas pariwisata dan seni budaya Kabupaten Oku Timur diperoleh hasil yaitu LAKIP yang ada pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sudah dibuat tetapi masih belum sesuai dengan pedoman peraturan yang ada. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ristina yang dilakukan pada tahun 2018 yang berjudul analisis akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kelautan dan Perikanan (Studi kasus pada sekolah usaha perikanan menengah negeri Bone) dan didapat hasil yaitu keseluruhan kinerja kegiatan sekolah usaha perikanan menengah (SUPM) Bone yang secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Stevani ditahun 2020 yang berjudul analisis laporan akuntabilitas kinerja pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Kota Tegal yang hasilnya yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal telah menunjukkan tugasnya dengan baik, dengan pencapaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 114,41% dan menjadi yang terbaik diwilayah kerja kantor wilayah Jawa Tengah dan D.I.Y.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 yang berisi tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah peraturan terbaru yang merupakan pengganti dari Permen PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Sistem Manajemen PNS. Ada beberapa perubahan dan perbedaan antara Permen PAN-RB Nomor 8 tahun 2021

dengan Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 yaitu terkait dengan ruang lingkup pengelolaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja, perilaku kerja, dan format SKP atau sasaran kinerja pegawai. Adapun perbedaan yang terlihat antara peraturan terdahulu dengan peraturan terbaru (Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022) adalah dari sisi format sasaran kinerja pegawai atau SKP dimana pada peraturan sebelumnya kita langsung menginput atau memasukan kegiatan yang berisi mengenai uraian tugas jabatan kita ke SKP, sedangkan pada Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 ini kita tidak diwajibkan lagi menginput aktivitas kegiatan pegawai, akan tetapi yang dinilai dan dimasukkan pada SKP adalah hasil kerja serta perilaku kerja dari seorang ASN. Perbedaan lainnya juga terletak pada aspek perencanaan kinerja, dalam peraturan sebelumnya yang berisi mengenai perencanaan dan penetapan SKP, tetapi perencanaan kinerja pada Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 ada beberapa perbedaan diantaranya penetapan dan klarifikasi ekspektasi (Permen PAN-RB 2022).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki misi untuk mewujudkan, mengamankan, meningkatkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang, serta lelang secara efektif dan efisien. Misi-misi tersebut dapat dijalankan dengan baik tetapi harus diperlukan nilai-nilai yang melandasi jalannya pemerintahan yang baik, misi tersebut dapat terlaksana apabila mengacu juga pada pedoman yang berlaku. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kinerja yang disampaikan akhir tahun

anggaran. Survei Komite Nasional Ekonomi Syariah dan *finance* menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Indonesia (Siswanto et al. 2022).

Tabel 1. 1
Persentase Hasil Lelang
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	2019	Persentase Hasil Lelang	100%	86,40%
2.	2020	Persentase Hasil Lelang	100%	107,56%
3.	2021	Persentase Hasil Lelang	100%	147,73%
4.	2022	Persentase Hasil Lelang	100%	115,27%

Sumber : Data LAKIP KPKNL Malang, 2023

Tabel 1. 2
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
Tahun 2019-2022

No	Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	2019	Persentase Pelaksanaan Anggaran	100%	109,09%
2.	2020	Persentase Pelaksanaan Anggaran	100%	101,37%
3.	2021	Persentase Pelaksanaan Anggaran	100%	99,63%
4.	2022	Persentase Pelaksanaan Anggaran	100%	100,38%

Sumber : Data LAKIP KPKNL Malang, 2023

Terlihat pada tabel diatas bahwa persentase kinerja karyawan KPKNL Malang menunjukkan bahwa hasil lelang dan persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Malang mulai tahun 2019 hingga 2021 mengalami fluktuatif atau ketidaktentuan karena mengalami kenaikan dan penurunan, dimana ada kinerja dari salah satu seksi yang targetnya tidak tercapai dan ada yang setiap tahunnya mengalami penurunan pencapaian target, hal ini terjadi karena masih banyak satuan kerja yang tidak mau melaporkan dan mengusulkan untuk penghapusan barang

milik negara (BMN) pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang. Hal ini disebabkan karena masih banyak dari satuan kerja yang merasa bahwa pengurusan untuk penghapusan barang milik negara (BMN) yang susah, rumit dan memakan banyak waktu sehingga mereka memilih untuk tetap menyimpan barang milik negara yang sudah usang maupun habis masa pakai dikantor. Hal itu yang membuat kinerja dari karyawan KPKNL Malang pada salah satu seksi tidak maksimal dan tidak bisa mencapai target yang sudah ditentukan. Beberapa upaya sudah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang untuk mewujudkan dan merealisasikan target persentase hasil lelang salah satunya dengan cara sosialisasi lelang, penggalian potensi lelang disetiap satuan kerja dan melakukan kunjungan langsung ke kantor satuan kerja secara berkala untuk menanyakan dan memberikan masukan terkait lelang.

Penyusunan laporan ini dilakukan selain untuk mencari tau bagaimana pelaksanaan kinerja yang ada di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang, penelitian ini juga mengangkat peraturan terbaru yaitu Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 mengenai kinerja aparatur sipil negara yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini penting dilakukan agar dapat memperoleh pengetahuan atau penemuan baru juga sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada maupun sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada.

KPKNL Malang merupakan salah satu instansi pemerintah dimana bergerak pada bidang pengurusan kekayaan negara dan lelang barang milik negara, KPKNL

Malang sendiri memiliki wilayah kerja yang paling luas di Provinsi Jawa Timur dimana membawahi satker atau satuan kerja di beberapa kabupaten dan kota dengan rincian 6 kabupaten yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan 4 Kota yaitu Kota Malang, kota Batu, Kota Kediri dan Kota Blitar. Melihat wilayah kerja yang sangat luas tersebut dan ditambah dengan banyaknya satuan kerja yang masih belum faham ataupun takut untuk melaporkan barang milik negara (BMN) yang sudah usang atau habis masa pakai maka banyak potensi kurang maksimalnya kinerja karyawan KPKNL Malang, maka peneliti tertarik untuk mengambil objek penelitian di KPKNL Malang. setiap bagian dari perusahaan harus konsisten dan saling mendukung dalam memperkuat praktik akuntansi manajemen, strategi dan struktur organisasi secara bersama-sama untuk mencapai keunggulan kompetitif dan target kinerja yang diharapkan (Wahyuni and Triatmanto 2020).

Lakip sendiri memiliki banyak manfaat yang berguna bagi sebuah instansi, adapun manfaat disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah bagi penyelenggaraan pemerintah (baik daerah maupun Pusat) adalah untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi, mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebuah instansi, sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja instansi secara berkesinambungan dan sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya. organisasi, konsumen,

dan lainnya pemangku kepentingan bertindak bersama untuk menciptakan nilai secara nyata cara kolaboratif (Nur Asnawi a 2021).

Dengan adanya fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Malang yaitu tidak tercapainya target kinerja karyawan pada tahun 2019 yaitu pada indikator hasil lelang yang disebabkan oleh kurangnya potensi lelang pada tahun tersebut dan di tahun 2021 yaitu pada indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran yang menyebabkan hasil lakip pada KPKNL Malang kurang maksimal oleh karena itu penulis memilih judul penelitian yaitu “Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 (Studi kasus pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah **“Bagaimana Hasil Capaian Kinerja Sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil capaian kinerja sesuai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan atau wawasan di bidang kinerja pada sektor publik terutama masalah akuntabilitas kinerja pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pegawai KPKNL Malang hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai KPKNL Malang.
- b. Bagi pihak lain diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi tambahan dan sebagai tolak ukur bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Padia Aulia Hadiyanti, 2017, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur.	LAKIP 1. Rencana Strategis 2. Program Kerja 3. Pengukuran Kinerja 4. Evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • LAKIP yang ada pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur sudah dibuat tetapi masih belum sesuai dengan pedoman peraturan yang ada. • Akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten OKU Timur masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja.
2.	Wahyu Ristina, 2018, Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelautan dan Perikanan	Terdapat beberapa indikator dalam penelitian ini yaitu indikator input (masukan), output	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan kinerja kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone yang secara umum telah

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	(Studi kasus pada sekolah usaha perikanan menengah negeri Bone)	(keluaran), dan outcome atau hasil. 1. indikator kinerja input umumnya terdiri dari tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM), dan bahan. 2. Indikator kinerja output dirumuskan berdasarkan keluaran dari masing-masing kegiatan. 3. Indikator Outcome yang berupa anggaran, realisasi, pendapatan dan belanja.		menunjukkan pencapaian kinerja yang baik. • Dari target yang ditentukan terhadap perencanaan dan monitoring evaluasi, bahwa capaian sasaran perencanaan dan monitoring evaluasi sebesar 100 % terlaksana dengan baik.
3.	Siti Nur Stevani, 2020, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal	Capaian Indikator Kinerja	Kualitatif dan Kuantitatif / Mix Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan KPKNL Kota Tegal merupakan laporan pertanggung-jawaban atas pencapaian visi dan misi dengan mengacu pada rencana strategis. • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				Tegal telah menunjukkan tugasnya dengan baik, dengan pencapaian nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 114,41% dan menjadi yang terbaik diwilayah kerja kantor wilayah Jawa Tengah dan D.I.Y.
4.	Beby Nurtesha Putri 2019, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya	Kinerja, Akuntabilitas	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan rasio kemandirian keuangan Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kubu Raya sudah memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan dengan rata-rata perolehan sebesar 95,44% atau sudah mencapai angka diatas 90%. • Menurut rasio efektifitas kemampuan dari Dinas BUDPARPORA untuk merealisasikan sasaran yang telah ditentukan juga sangat baik karena persentase

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>rata-ratanya sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 106,57%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan rasio aktifitas yang terbagi atas 2 (dua) bagian yakni pos belanja rutin dan pos belanja pembangunan.
5.	Dessy Isnaini S, 2016, Evaluasi penerapan Anggaran Berbasus Kinerja Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.	Sistem Anggaran, Kinerja	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem realisasi anggaran berbasis kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan kebijakan pemerintah seperti instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Kualitas kinerja masing masing bagian dengan rata rata capaian realisasi sebesar 99,50% dari target sebelumnya. • Kualitas pelaksanaan dan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				jenis kegiatan yang semakin beragam dan spesifik yang berdampak pada meningkatnya jenis pelayanan yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
6.	Dadan Biworotomo, 2016, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Surakarta. (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Surakarta)	Penerapan akuntansi berbasis akrual, penganggaran berbasis kinerja, sistem pelaporan, dan kompetensi aparatur daerah	Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan akuntansi akrual mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. • Penganggaran berbasis kinerja yang tidak memiliki dampak terhadap AKIP Kota Surakarta. • Kejelasan target anggaran yang mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta. • Pengendalian akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>kinerja instansi pemerintah Kota Surakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pelaporan pada pemerintah Kota Surakarta memiliki pengaruh pada akuntabilitas kinerja.
7.	<p>Bambang Pamungkas, 2012, Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>Akuntansi sektor publik, Kualitas laporan keuangan, AKIP</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah baik secara parsial maupun simultan. Hal ini berarti bahwa baik secara parsial maupun simultan jika kualitas peraturan per undang- undangan yang tercermin dari penerapan asas formalitas dan asas materialitas diterapkan.</p>
8.	<p>Akbar Reyformatio Zakky Widiyanto, 2014, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Studi Kasus</p>	<p>LAKIP, Good Public Governance, Akuntabilitas, Kinerja</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>LAKIP Deputy SDM Aparatur telah disusun sesuai regulasi yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang</p>

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	pada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB)			petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara <i>review</i> atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Perpres 29/2014, Pasal 1, ayat 14. Deputi SDM Aparatur sudah menyusun LAKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9.	William Wijaya, 2021, Analisis Kinerja Karyawan dan Faktor yang mempengaruhinya.	Kompensasi, motivasi serta kinerja karyawan	Kuantitatif	Motivasi intrinsik dan ekstrinsik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dimana, dimensi pengakuan, hubungan dengan teman kerja, kondisi kerja dan gaji yang diterima merupakan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				dimensi yang paling berpengaruh.
10.	Fiya Milla Fatmawati, Sri Hartono, Istiatin, 2021, Kinerja Karyawan ditinjau dari Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, serta Disiplin Kerja pada Showroom Muhari Motor 651 Karanganyar.	Kinerja Karyawan, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja,	Kuantitatif	Berdasarkan hasil regresi linier berganda maka, variabel disiplin kerja ber-pengaruh terhadap kinerja karyawan pada Showroom Muhari Motor 651 Karanganyar dengan nilai uji sebesar 0,530. Sedangkan Dari hasil uji koefisien determinasi (R ²) dengan nilai 0,809% Hal ini menunjukkan jika variabel kinerja karyawan dijelaskan oleh variabel kepemimpinan, lingkungan kerja dan disiplin kerja sebesar 80,9%, sedangkan sisanya sebesar 19,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah, 2023

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Padia Aulia Hadiyanti, 2017, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Persamaan penelitian Padia Aulia Hadiyanti dengan	Perbedaan penelitian Padia Aulia Hadiyanti dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Oku Timur	penelitian saat ini adalah sama sama meneliti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).	penelitian yang berbeda, pada penelitian Padia Aulia Hadiyanti bertempat di kantor dinas pariwisata dan seni budaya Kabupaten Oku Timur sedangkan penelitian ini memilih objek pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang. Selain itu penelitian ini mengambil data yang lebih lama yaitu dalam kurun waktu 4 tahun sedangkan pada penelitian Padia Aulia Hadiyanti hanya 2 tahun. Penelitian ini juga menggunakan undang-undang terbaru yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.
2.	Wahyu Ristina, 2018, Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone)	Persamaan penelitian Wahyu Ristiana ini adalah sama sama meneliti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan melakukan observasi secara langsung.	Perbedaan penelitian Wahyu Ristiana dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian Wahyu Ristiana bertempat disekolah usaha perikanan menengah negeri Bone sedangkan penelitian ini memilih objek pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang. Selain itu penelitian ini lebih berfokus kepada kinerja karyawan tanpa

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
			mengukur hasil keuangan ataupun anggaran pada lokasi penelitiannya.
3.	Siti Nur Stevani, 2020 Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal	Persamaan penelitian Siti Nur Stevani dengan penelitian ini adalah dari segi penelitiannya yang menggunakan 2 metode atau mix metode yaitu metode kualitatif dan kuantitatif.	Perbedaan penelitian Siti Nur Stevani dengan penelitian saat ini terletak pada waktu penelitian yang berbeda, selain itu penelitian ini mengambil data yang lebih lama yaitu dalam kurun waktu 4 tahun sedangkan pada penelitian Siti Nur Stevani hanya selama 3 tahun.
4.	Beby Nurtesha Putri, 2019 Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Kubu Raya	Persamaan penelitian Beby Nurtesha Putri dengan penelitian ini adalah sama sama mengangkat topik mengenai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Perbedaan penelitian Beby Nurtesha Putri dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian Beby Nurtesha Putri bertempat di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya sedangkan penelitian ini memilih objek pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang. Selain itu penelitian ini lebih berfokus kepada kinerja karyawan tanpa mengukur hasil keuangan ataupun anggaran pada lokasi penelitiannya.

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
5.	Dessy Isnaini Syafitri, 2016 Evaluasi Penerapan Sistem Angfaaran Berbasis Kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang	Persamaan penelitian Dessy Isnaini Syafitri dengan penelitian saat ini adalah sama sama meneliti laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).	Perbedaan penelitian Dessy Isnaini Syafitri dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, pada penelitian Dessy Isnaini Syafitri bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang sedangkan penelitian ini memilih objek pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang.

Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah, 2023

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntabilitas

2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) adalah kewajiban dari pemegang amanat/*agent* dan kepala daerah beserta perangkatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemegang amanat (*principal*), dan dilaksanakan sesuai dengan hak dan wewenang pemegang amanat, sedangkan menurut Poae dan Saerang (2013:29), mengacu pada tanggung jawab atas keputusan dan tindakan baik dari individu maupun entitas yang dipilih.

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) yang memiliki kuasa dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut, untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang berada di bawah kendalinya (Mardiasmo 2002).

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa asing yaitu "*accountability*" dalam hal ini istilah "*accountability*" mengacu pada suatu keadaan yang harus dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas secara umum mengacu pada tanggung jawab untuk memberikan informasi atau pertanggungjawaban kepada orang yang berhak menerimanya, termasuk penjelasan tentang kinerja dan tindakan badan hukum atau pimpinan organisasi, kemampuan untuk memberikan kepuasan atas kinerja kegiatan seseorang merupakan salah satu dari tiga prinsip dasar tata kelola yang baik, dan akuntabilitas atau tanggung jawab. Jadi Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kepada mereka yang memberikan otoritas atau kebijakan (Rifda Arum n.d.).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban yang menggunakan kekuasaan di berbagai entitas pemerintahan untuk mengawasi yang lain sehingga mencegah penumpukan kekuasaan sekaligus memupuk pengawasan bersama (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan itu adalah yudikatif (MA dan sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR) dan eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya) (Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin 2007).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu instansi maupun entitas kepada pihak yang berwenang yang menerima pertanggungjawaban dan pelaporan atas kinerja dan tindakan dari badan hukum pimpinan suatu organisasi.

2.1.1.2 Dimensi Akuntabilitas

Prinsip dasar pemerintahan yang efektif adalah akuntabilitas publik, yang mengatakan bahwa pegawai negeri bertanggung jawab kepada rakyat atas semua

tindakan mereka dan cara mereka melaksanakan tugas mereka. Memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan tentang operasi dan kinerja pemerintah disebut sebagai akuntabilitas publik dalam konteks entitas pemerintah. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas dan konstituen lainnya yang merupakan pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan fokus utama akuntabilitas publik.

Akuntabilitas memiliki 5 dimensi yaitu:

a. Transparansi

Dalam Akuntabilitas, transparansi dikenal sebagai kemudahan akses agar mendapatkan informasi terkait dengan fungsi dan kinerja suatu organisasi. Menurut definisi teoretis ini, organisasi publik harus selalu menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan tentang peran dan pencapaian mereka. Hal ini memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengidentifikasi fungsi masing-masing organisasi dan menggunakannya sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja organisasi.

b. Pertanggungjawaban

Adalah proses untuk memastikan bahwa individu atau organisasi telah bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan mereka, bahwa kesalahan dihukum, dan bahwa perilaku yang baik dihargai atau diberikan penghargaan. Aspek ini dapat diartikan sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban organisasi publik atas kelalaian dalam penyediaan produk atau layanan kepada publik.

c. Pengendalian

Dimensi ini berhubungan dengan keadaan dimana organisasi melaksanakan instruksinya dengan tepat. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik dapat memastikan bahwa mereka tetap beroperasi sesuai rencana dengan melakukan kontrol terhadap mereka.

d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi maupun perusahaan dibatasi undang-undang yang berlaku. Dalam sektor publik, organisasi menggunakan norma kebijakan sebagai pedoman untuk menjalankan operasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memajukan kesesuaian dalam penerapan hukum yang berlaku. Tantangan yang mungkin dimiliki organisasi publik dalam menjalankan fungsinya akan difasilitasi oleh implementasi yang konsisten dari persyaratan legislatif, jika tata kelola dan kualitas aturan yang menjadi landasan dapat dipercaya, niscaya hal ini akan dilakukan secara konsisten.

e. Responsivitas

Tujuan dari Responsivitas ini adalah untuk menunjukkan bahwa bisnis peduli dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan harapan substantif pemangku kepentingan.

2.1.1.3 Alat-Alat Akuntabilitas

Menurut (Padia Aulia Hadiyanti 2017) Akuntabilitas sangat memerlukan pelaporan, sehingga fokus dari pelaporan kinerja adalah pada mekanisme akuntabilitas.

Alat-alat Akuntabilitas terbagi menjadi 7, yaitu:

a. Rencana Kinerja

Pada poin ini lebih menekankan mengenai komitmen atau tanggungjawab organisasi yang dibuat untuk bisa menggapai hasil yang sama dengan tujuan.

b. Rencana Kinerja

Rencana strategik merupakan sesuatu tahapan yang dapat memberikan kontribusi bagi organisasi dalam berfikir mengenai sasaran yang digunakan agar dapat mensukseskan misi mereka serta apa saja yang wajib dilakukan agar sasaran tersebut dapat tercapai.

c. Konvensi Kinerja

Konvensi kinerja didesain dengan hubungan yang diantaranya melakukan pekerjaan untuk menyediakan suatu proses yang mengukur kinerja serta bertepatan dengan membangun akuntabilitas.

d. Laporan Akuntabilitas

Laporan pertanggungjawaban yang diterbitkan tahunan seringkali menyertakan data program dan keuangan, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang menunjukkan seberapa baik kinerja organisasi dalam mencapai tujuan utamanya.

e. Evaluasi Sendiri

Merupakan proses dimana organisasi memonitor kinerjanya serta mengevaluasi kemampuannya untuk mencapai tujuan kinerja, dimensi capaian kinerja, serta tahapan- tahapan, dan mengatur serta meningkatkan proses itu.

f. Evaluasi Kinerja

Merupakan proses berjalan untuk merancang serta memonitor kinerja. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kekurangan yang ada dan memperbaiki untuk kedepannya dengan cara menyamakan kinerja aktual sepanjang periode review tertentu dengan kinerja yang direncanakan.

g. Kendali Manajemen

Akuntabilitas manajemen adalah harapan disaat para manajer hendak bertanggungjawab atas mutu serta ketepatan waktu kinerja, tingkatan produktivitas, mengatur bayaran serta menekan berbagai macam aspek negatif aktivitas, serta menjamin jika program diatur dengan integritas serta cocok dengan peraturan yang berlaku.

2.1.1.4 Jenis Akuntabilitas

Menurut Sheila Elwood mengemukakan terdapat 4 jenis akuntabilitas, ialah:

- a. Akuntabilitas hukum serta peraturan, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan jaminan terdapatnya kepatuhan terhadap hukum serta peraturan lain yang diisyaratkan dalam pemakaian sumber dana publik, untuk menjamin dijalankannya tipe akuntabilitas ini butuh dicoba audit kepatuhan.
- b. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melakukan tugas apakah sudah baik dan sesuai. Tipe akuntabilitas ini bisa diwujudkan lewat pemberian pelayanan yang kilat, responsif, dan murah bayaran.
- c. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan perimbangan apakah tujuan yang diresmikan bisa dicapai dengan baik, ataupun apakah

pemerintah daerah sudah memikirkan alternatif program yang bisa membagikan hasil optimal dengan bayaran yang minimum.

- d. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah wilayah dalam terhadap DPRD selaku legislatif serta warga luas. Butuh terdapatnya transparansi kebijakan sehingga warga bisa melaksanakan evaluasi serta pengawasan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Jabbra dan Dwivedi (Manggaukang Raba n.d.) mengungkapkan bahwa ada 4 jenis Akuntabilitas, diantaranya yaitu:

1. *Administrative* / Akuntabilitas organisasi

yaitu suatu lembaga atau organisasi yang butuh akan hubungan hirarki yang transparan dari pusat pertanggungjawaban dan unit unit saat melakukan perintah.

2. Akuntabilitas Legal (*Legal accountability*)

yaitu akuntabilitas yang menghubungkan dengan tindakan pada domain publik yang menggunakan peraturan serta pengadilan yang sudah ditetapkan. Walaupun kekuasaan pengadilan dan legislatif tidak begitu kuat untuk menghukum administrasi, tetapi semakin berjalannya waktu akan mengalami perubahan hukum.

3. Akuntabilitas Politik (*Political accountability*)

yaitu akuntabilitas yang ada pada sistim pemerintahan yang demokrasi, administrasi memiliki kewajiban mengungkapkan bahwa kekuasaan otoritas publik untuk mengatur, menetapkan prioritas, mendistribusikan kembali sumberdaya dan menjamin kepatuhan atas perintah.

4. Akuntabilitas Moral (*Moral accountability*), yaitu dimana pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara moral atas tindakan-tindakan yang dilakukannya. Dengan begitu setiap kegiatan yang dilakukan aparat pemerintah dapat didasari dengan prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana yang diakui oleh konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah mapan.

2.2.2 *Good Governance*

2.2.2.1 Pengertian *Good Governance*

Good governance adalah keleluasan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan sendirinya menuntut adanya sinergi antara kinerja dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sehingga upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Hidayat, Nurseptiani, and Faisal 2021).

Istilah “*good governance*” sering digunakan dalam berbagai *event* dan peristiwa oleh berbagai pihak, namun demikian definisinya bervariasi dari satu kelompok ke kelompok lain. Beberapa individu mendefinisikan tata pemerintahan yang baik sebagai kinerja suatu institusi, seperti kinerja pemerintah suatu negara, bisnis, atau organisasi lingkungan yang mematuhi standar tertentu (Madjid 2019).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep yang disiapkan untuk mengatur bagaimana organisasi dioperasikan dan dikendalikan secara tepat melalui prinsip dalam mekanisme penerapannya yaitu transparansi, independensi, akuntabilitas, akuntabilitas, dan kewajaran (Wahyuni and Wafiroh 2023). Proses bisnis telah mengalami perkembangan, seiring dengan perkembangan teknologi dan sains (Yustyarani 2020).

Good governance sering disebut sebagai tata pemerintahan yang baik. Di sini yang dimaksud dengan kata “baik” adalah mengikuti dari beberapa peraturan yang sejalan dengan asas-asas tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Tata pemerintahan yang baik menurut *World Bank* adalah pelaksanaan manajemen pembangunan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan pasar yang efisien, mencegah salah alokasi dana investasi, dan membangun lingkungan hukum dan politik untuk perluasan aktivitas perusahaan, penegakan disiplin fiskal, dan pemberantasan korupsi baik secara politik maupun administratif (Haryanto, Sahmuddin, and Arifuddin 2007).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah tata kelola organisasi yang diatur secara baik dengan menggunakan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.

2.2.2.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut (Qodrunnada 2021) Prinsip merupakan kunci yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip dari *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* adalah:

- a. Partisipasi (*participation*), yaitu setiap warga negara mempunyai kesamaan suara dalam pembuatan kebijakan. Setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa harus dibatasi dan dipengaruhi oleh siapapun.
- b. Responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan, prinsip pengelolaan yang kokoh, serta aturan dan regulasi yang relevan.

- c. Mampu untuk menjadi penghubung perbedaan kepentingan diantara masyarakat, supaya dapat tercipta konsensus bersama.
- d. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan tentang peran, struktur, dan mekanisme aparatur kelembagaan akuntabilitas pemangku kepentingan yang efektif.
- e. Transparansi (*transparency*), adalah adanya penemuan dalam proses pengambilan keputusan dan penyajian data terkait dalam aturan pengambilan keputusan.
- f. Memiliki visi yang luas, jelas, dan tegas untuk menjaga dan menjamin keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

2.2.2.3 Tujuan diterapkannya *Good Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengungkapkan jika *good governance* memiliki tujuan untuk menciptakan nilai tambah untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Forum ini juga menunjukkan bagaimana penerapan *good governance* memiliki tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai dan asetnya terpelihara dengan baik.

Tujuan lain dari penerapan *good governance* adalah supaya perusahaan bisa mengoperasikan dan menjalankan praktik-praktik usaha dengan sehat serta di tambah dengan kegiatan yang transparan juga terjaganya keseimbangan antara upaya pencapaian tujuan ekonomi dengan tujuan sosial perusahaan. Selain itu dalam proses, metode, prosedur, dan aturan formal atau informal yang mengatur organisasi ada aturan utama yang ada dan juga harus diterapkan dan dipatuhi diberi nilai lebih dalam tata kelola yang baik.

2.2.3 Kinerja

2.2.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2009) kinerja mengacu pada kemampuan seorang karyawan untuk menyelesaikan tugas dalam kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kinerja dalam hal ini menunjukkan hasil kerja yang dicapai seseorang setelah melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan oleh organisasi. Sedangkan baik atau tidak yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan tuntutan perusahaan dapat digunakan untuk menentukan tampak tidaknya hasil kerja. Jika karyawan mampu bekerja sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan oleh perusahaan, maka kinerja dapat tercapai dengan baik (Budiyanto and Mochklas 2020).

Untuk mencapai tujuan organisasi, eksekutif dan karyawan (SDM) yang bekerja di lembaga pemerintah dan bisnis harus melaksanakan rencana kerja yang dibuat oleh lembaga (Chintia Pristiyanti 2016).

Mengutip dari ebook yang berjudul kinerja karyawan yang diterbitkan oleh Widina Bhakti Persada Bandung (2020) mengungkapkan bahwa Pencapaian yang dicapai oleh seseorang disebut dengan *actual performance* atau *job performance* yang biasa kita sebut dengan performance atau kinerja. Pegawai yang menjalankan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan berhasil secara kualitas dan kuantitas disebut juga dengan kinerja. Prestasi kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang telah disepakati bersama merupakan pengertian umum tentang kinerja (Budiyanto and Mochklas 2020).

Selain itu menurut Sofyan Tsauri (2014), kinerja adalah hasil yang diperoleh individu maupun kelompok individu tercermin dalam kinerja. Ada hubungan yang erat antara kinerja individu dan kinerja organisasi atau perusahaan. Dengan kataan lain jika kinerja karyawan (*individual performance*) bagus berarti ada kemungkinan besar bahwa kinerja perusahaan (*corporate performance*) berhasil bagus. Kinerja juga mengacu pada tingkat pelaporan atas penyelesaian tugas oleh semua personel dalam perusahaan atau badan pemerintah. Untuk memaksimalkan suatu kegiatan, perusahaan dan lembaga pemerintah harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja di kedua entitas ini (Tsauri 2014).

Jadi bisa disimpulkan bahwa kinerja yaitu hasil kerja yang dilakukan dan dicapai seorang pekerja dalam menjalankan kegiatan kerja berupa tugas-tugas yang harus dikerjakan dan menjadi tanggungjawabnya yang didasari oleh kecakapan, kecerdasan, pengalaman, dan kesungguhan dalam bekerja.

2.2.3.1 Tujuan Kinerja

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran kinerja berkelanjutan memberikan masukan yang bermanfaat untuk tujuan masa depan dan peningkatan berkelanjutan dan terus menerus. Sistem pengukuran kinerja digunakan dalam beberapa hal yaitu:

- a. Meningkatkan komunikasi strategi yang lebih baik.
- b. Untuk mengukur keberhasilan baik secara finansial maupun non finansial secara adil sehingga kampanye untuk membangun strategi dapat disertakan.

- c. Mempertimbangkan kepentingan manajer tingkat menengah dan bawah dalam menginspirasi mereka untuk mencapai keselarasan tujuan.
- d. Sebagai sarana memperoleh kebahagiaan berdasarkan preferensi pribadi dan kompetensi logis kelompok.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut peneliti bisa mengambil kesimpulan tujuan pengukuran kinerja digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai pencapaian kinerja dan bukan sekedar menyajikan laporan keuangan saja.

1. Siklus Pengukuran Kinerja

Langkah-langkah pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikenal dengan siklus pengukuran kinerja. Proses evaluasi efektivitas organisasi publik tidak termasuk tahapan penting. Menurut (Risky Jaka Perdana and Wiguna n.d.) mengutip dari Lohman (2003), pengembangan dari siklus pengukuran kinerja organisasi dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

- a. Menjelaskan misi organisasi.
- b. Semua bidang fungsional dilakukan analisis peran dan tanggungjawab untuk menggapai tujuan strategis.
- c. Mencari tujuan strategis dari organisasi yaitu dengan melihat misi.
- d. Konsistensi yang dijamin dengan tujuan strategis atas kriteria kinerja pada setiap level.
- e. Semua bidang fungsional ukuran kinerja yang harus harmonis (*compatible*).

2. Indikator dalam pengukuran kinerja

Menurut (Indra 2010) Indikator kinerja adalah variabel kualitatif dan kuantitatif yang, jika digabungkan, menggambarkan sejauh mana tujuan atau target telah ditetapkan.

Elemen indikator kinerja menurut Indra Bastian (2015) sebagai berikut:

- a. *Input* (masukan)
- b. *Outputs* (keluaran)
- c. *Outcomes* (hasil)
- d. *Benefits* (manfaat)
- e. *Impacts* (dampak)

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator *inputs*

Menunjukkan sumber daya yang digunakan dalam suatu proses, program, maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran (*output* maupun *outcome*).

- b. Indikator *output*

Menunjukkan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan langsung dari suatu proses, program atau aktivitas yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.

- c. Indikator *outcome*

Menunjukkan tingkat suatu aktivitas, proses, maupun program dalam memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Ukuran ini menggambarkan hasil-hasil aktual yang dicapai dan berbagai efek yang dihasilkan.

- d. Indikator *benefits*

Keunggulan yang dicapai melalui indikator hasil adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir mempraktekkan kegiatan indikator kinerja ini.

Keunggulan ini tidak akan langsung terlihat atau bahkan diketahui untuk beberapa waktu, terutama dalam jangka menengah dan panjang.

e. Indikator *impact*

Menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh hasil positif dan negatif dari tindakan tersebut. Indikator dampak, seperti halnya indikator manfaat, biasanya hanya dapat diketahui dalam jangka menengah atau panjang. Indikator *impact* ini menunjukkan justifikasi pelaksanaan aktivitas dan merinci elemen makro implementasinya.

2.2.4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2.2.4.1 Definisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Ini memberikan ringkasan tentang bagaimana suatu instansi pemerintah menjalankan tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian atau kegagalan upaya misi organisasi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui perangkat pertanggungjawaban berkala yang disusun dan disampaikan secara berkala, terinstitusionalisasi dan sistematis.

Mengutip dari (Padia Aulia Hadiyanti 2017) berdasarkan intruksi Presiden Nomer 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa kewajiban dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan skema stategik mengenai program-program utama yang dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya. Laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP) tersebut dimaksudkan untuk *enforcement* atau pelaksanaan agar masing-masing dari instansi mempunyai visi, misi dan strategi untuk mencapai program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi (Lestari and Oktaviana 2020).

2.2.4.2 Prinsip penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut (Padia Aulia Hadiyanti 2017) prinsip-prinsip penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu:

a. Prinsip lingkup pertanggung jawaban

Adanya pusat tanggungjawab atau *responsibility center* sehingga ruang lingkungannya jelas. Dengan begitu kegiatan yang dikendalikan (*controllable*) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporan.

b. Prinsip prioritas

Prinsip ini mencakup perincian yang signifikan dan relevan untuk akuntabilitas lembaga yang diperlukan untuk tindak lanjut yang harus dicatat, serta untuk pengambilan keputusan.

c. Prinsip manfaat

Prinsip ini berarti manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusutan dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam hal ini, penting juga untuk fokus pada sejumlah kualitas laporan yang solid, termasuk relevansi, ketepatan waktu, ketergantungan, kepercayaan, kejelasan, dan ketelitian.

Berdasarkan prinsip-prinsip LAKIP tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip LAKIP yaitu harus membuat hal-hal penting dan relevan serta transparan

mengenai kebersihan dan kegagalan organisasi pemerintah sehingga LAKIP dapat bermanfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

2.2.4.3 Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun Manfaat dari LAKIP yaitu:

1. Sebagai bukti untuk menilai akuntabilitas individu yang membutuhkan.
2. Penyempumaan dokumen perencanaan periode mendatang.
3. Peningkatan pelaksanaan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempumaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

2.2.5 Akuntabilitas dalam perspektif islam

Akuntabilitas dalam perspektif islam pertama kali ada didalam konsep khalifah yang memiliki pandangan bahwa manusia sebagai makhluk pemimpin dimuka bumi yang memiliki pedoman berupa Al-Qur'an dan Hadist yaitu sumber hukum utama dalam islam. Standar akuntansi yang tidak memihak, sebanding, transparan, dan sejalan dengan prinsip syariah diperlukan untuk menciptakan entitas syariah dengan laporan keuangan yang sangat akuntabel, adapun faktor-faktor yang dibutuhkan untuk membuat akuntabilitas syariah lebih optimal yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan
 - a. Penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis entitas syariah.
 - b. Pemenuhan aspek syariah.
2. Aspek sumber daya insani

Pegawai yang memiliki perilaku jujur (siddiq), bisa dipercaya (amanah), senantiasa menyebarkan kebaikan (tabligh), serta cerdas (fathanah).
3. Aspek pengawasan dan pemeriksaan

- a. Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan (*supervision and examination*) terhadap bank syariah untuk memastikan bahwa bank tersebut telah melakukan kegiatan usaha yang sehat dan sesuai dengan standar kehati-hatian.
- b. Pemeriksaan audit yang dilakukan oleh lembaga eksternal auditor termasuk akuntan publik.
- c. Disiplin pasar (*market discipline*). Masyarakat sebagai *stakeholder* lebih meningkatkan peran sebagai pengguna bank syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga muncul suatu mekanisme pengawasan publik yang berpengaruh besar dalam memacu kinerja bank syariah.

Akuntabilitas terhubung dengan pemenuhan kewajiban yang ditinjau dari konsep kepemilikan. Seperti yang ada didalam surat Thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya : "Milik-Nyalah apa yang berada dilangit, apa yang ada dibumi, apa yang ada diantara keduanya, dan apa yang ada dibawah tanah."

Dengan melihat ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa pertanggungjawaban sangat ditekankan oleh Allah melalui istilah hisab atau perhitungan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas apa yang telah dilakukan selama ini pada hari pembalasan. Akuntabilitas menjelaskan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki oleh perusahaan benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan, tidak ada yang ditutup-tutupi atau dimanipulasi (Sudaryanti 2011).

2.2.6 Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022

Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 adalah peraturan terbaru dimana menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi Berkala Karyawan mengacu pada proses di mana petugas penilaian kinerja mengevaluasi keseluruhan kinerja dan perilaku kerja karyawan secara bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja berkala karyawan berdasarkan kuadran kinerja karyawan.

Adapun perbedaan Permen PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 dengan Permen PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Sistem Manajemen PNS yaitu terletak pada format sasaran kinerja pegawai (SKP) dimana pada aturan sebelumnya pelaksana tinggal memasukan kegiatan diuraian tugas jabatan ke SKP, namun pada peraturan terbaru ini tidak lagi menginput aktivitas kegiatan pegawai, tetapi yang dinilai dan dimasukan dalam SKP yaitu hasil kerja serta perilaku kerja dari seorang ASN, selain itu perbedaan juga terletak pada aspek perencanaan kinerja, dimana aturan sebelumnya meliputi perencanaan dan penetapan SKP, sedangkan perencanaan kinerja pada Permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi. Disegi penilaian kineja juga terlihat perbedaan pada peraturan terbaru penilaian kinerja menggunakan rumus-rumus yang matematis dengan pembobotan *cascading direct dan non-direct* dan juga pembobotan kinerja utama dan tambahan. perusahaan harus merawatnya dengan baik karyawan sedemikian rupa sehingga mereka akan menerima kebaikan kepedulian para pemangku kepentingan (Safitri and Dwi Riyanto Indah Yuliana 2020).

2.2.7 Kerangka Konseptual

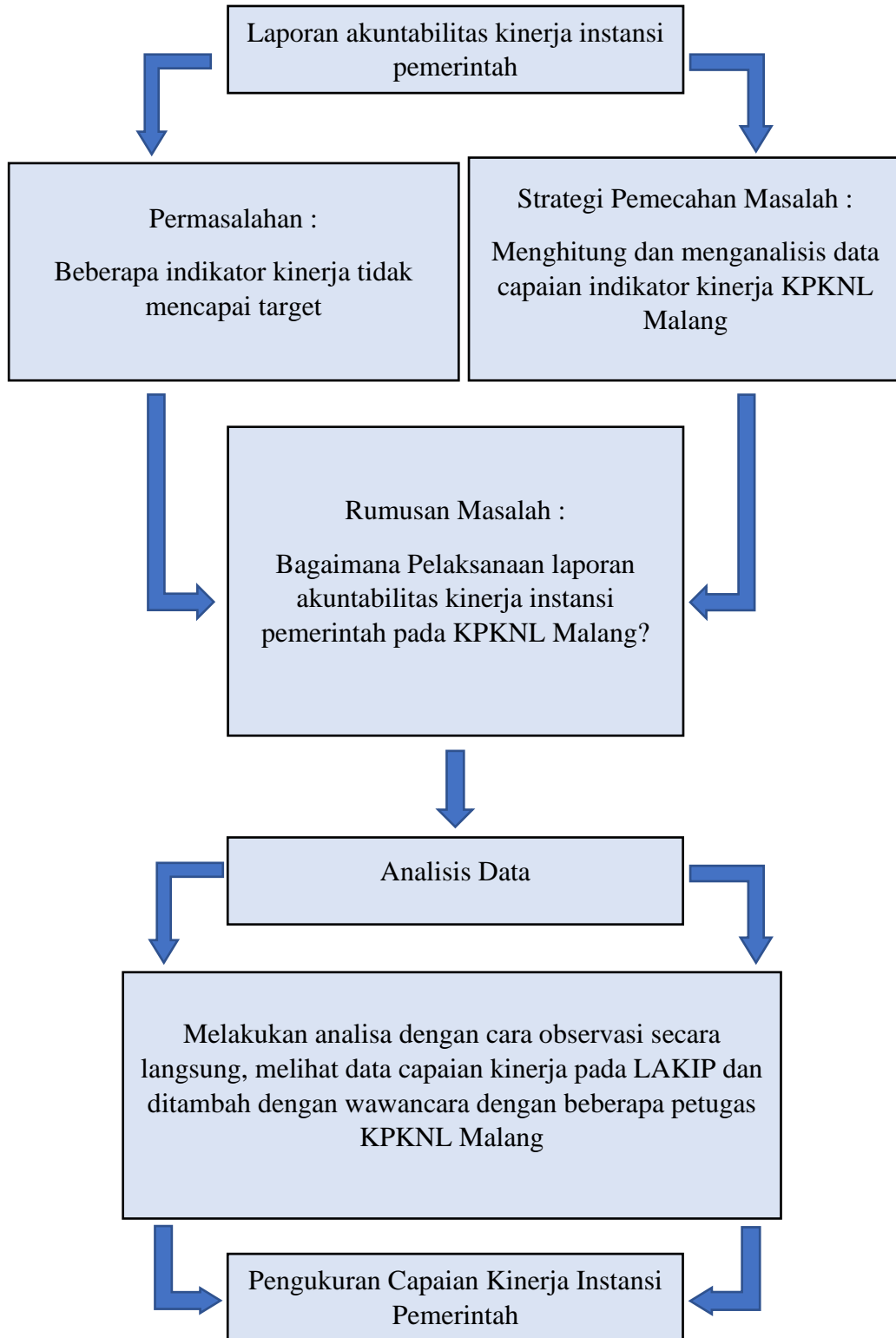
Akuntabilitas didalam suatu instansi pemerintah digunakan sebagai media untuk mengetahui dan melihat pertanggungjawaban dari pihak yang diberikan kepercayaan di instansi pemerintah yang selanjutnya mengungkapkan keberhasilan serta kegagalan melaksanakan tugas dan kewajibannya serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. KPKNL Malang disini ialah satu dari banyak saksi instansi pemerintah yang bergerak pada pengurusan aset negara dan lelang memiliki laporan akuntabilitas yang mana harus dilaporkan setiap tahun sebagai pertanggungjawaban atas tugas tugasnya.

Menurut Instruksi Presiden Nomer 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memberikan penjelasan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berkaca dari kasus tersebut maka peneliti mempunyai keinginan untuk menganalisis capaian kinerja yang ada didalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada KPKNL Malang dengan menggunakan analisa deskriptif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang digambarkan dengan skema gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber : Data yang diolah, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan satu variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dengan mengambil data LAKIP Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang selama kurun waktu 4 tahun kebelakang mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Pendekatan kualitatif yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak saja berambisi mengumpulkan data dari sisi kuantitasnya (Khasanah, Meldona, and Djakfar 2020). Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sifatnya yang lebih mendalam akan membantu peneliti untuk menggali informasi dan mendapatkan hasil yang lebih detail dan terperinci.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah persoalan dalam lingkungan yang kompleks dimana subjek atau peneliti merupakan instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, analisis data secara induktif secara mendalam, dan hasil kajian lebih tepat daripada yang diperoleh melalui generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, statistika tidak dipengaruhi oleh teori melainkan oleh fakta yang disajikan selama penelitian lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan sangat induktif (Abdussamad 2021).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang yang berlokasi di Jl. S. Supriadi No.157, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang karena peneliti merasa tertarik untuk mencari tau bagaimana akuntabilitas kinerja yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang serta apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.

3.3 Subjek Penelitian

Sumber informasi penelitian, atau lebih tepatnya, orang atau benda yang dicari pengetahuannya, dikenal sebagai subjek penelitian. Orang, benda, atau organisme yang menjadi sumber data untuk pengumpulan data penelitian inilah yang disebut Muhammad Idrus sebagai subjek dari penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, subjek dalam penelitian adalah setiap benda, benda, maupun orang yang dijadikan sebagai titik data yang terkait dengan variabel penelitian (Rahmadi 2011).

Subjek penelitian ini adalah beberapa karyawan KPKNL Malang diantaranya yaitu Bu Firda selaku pelaksana seksi kepatuhan internal, Bu Nova dan Pak Satria selaku pelaksana seksi hukum dan informasi pada KPKNL Malang dan diperkuat dengan mewawancarai Kepala KPKNL Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini. Berbeda dengan data primer yang hanya dapat diperoleh dari sumber aslinya, data sekunder merupakan informasi yang sudah tersedia dan hanya perlu dicari dan dikumpulkan. Kita harus mengumpulkan data primer langsung dari sumber aslinya jika data sekunder dapat diperoleh dengan lebih cepat dan mudah karena tersedia secara luas, seperti di perusahaan, organisasi perdagangan, kantor pemerintah, perpustakaan, dan bisnis. melalui sumber yang tepat dan mereka yang kami minta untuk berpartisipasi dalam penelitian kami. Adapun jenis dari data adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian, dalam situasi ini peneliti menggunakan instrumen tertentu untuk melakukannya. Peneliti mengumpulkan informasi primer untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Ini digunakan untuk melengkapi informasi primer yang telah dikumpulkan dari buku, artikel, studi sebelumnya, sumber pustaka dan sumber lainnya (Hasan, 2002).

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian mengenai masalah akuntabilitas kinerja kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang dan

ditambah dengan data sekunder yang berupa data LAKIP KPKNL mulai tahun 2019 - 2022.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2018) Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai berbagai sumber dan berbagai cara. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder, bergantung pada asal data. Selain itu, dengan melihat metode atau prosedur pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuisioner/angket, dokumentasi, dan kombinasi dari keempatnya.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode, yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi dilakukan dalam penelitian ini karena metode ini digunakan dengan maksud untuk mengetahui respon subyek yang diteliti mengenai permasalahan yang ada. Peneliti melakukan observasi langsung (*direct observation*). Informasi yang dikumpulkan dari pengamatan langsung akan digabungkan dengan informasi yang dikumpulkan dari responden. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan pendekatan pengumpulan data lainnya, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki kualitas yang unik. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan tentang perilaku dan maknanya dengan terlibat dalam kegiatan observasi.

Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada kantor pelayanan

kekayaan negara dan lelang Malang untuk mengetahui penerapan akuntabilitas kinerja pada kantor tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum. Peneliti melihat dan mendengar objek penelitian dan menarik kesimpulan dari apa yang direkam, sehingga efektivitas observasi sebagai pendekatan pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh peneliti sendiri.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, wawancara sendiri merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari responden yang terkait dengan penelitian. Wawancara juga bisa dikatakan sebagai percakapan tatap muka (*face to face*) antara penanya/pewawancara dengan narasumber, yaitu disaat pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang sedang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) dengan menggunakan kalimat bebas namun masih dalam konteks yang wajar.

Menurut Sugiyono (2018) jenis wawancara semiterstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana wawancara semiterstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas dibandingkan wawancara terstruktur namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana responden yaitu Bu Firda selaku pelaksana seksi Kepatuhan Internal kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang dimintai pendapat, ide atau suatu

trobosan dalam menangani suatu permasalahan yang ada, selanjutnya informasi yang didapat akan menunjukkan hasil yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Dalam mewawancarai Bu Firda selaku pelaksana seksi Kepatuhan Internal, Bu Nova dan Pak Satria selaku pelaksana seksi hukum dan informasi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang peneliti menggunakan alat-alat yang bisa membantu terselenggaranya wawancara, diantaranya adalah buku catatan yang berfungsi untuk mendapatkan data dari hasil wawancara, handphone atau alat perekam yang berfungsi untuk merekam semua percakapan akan tetapi dalam menggunakan alat perekam peneliti meminta izin terlebih dahulu apakah obrolan tersebut bisa direkam, dan kamera yang berfungsi untuk memperkuat adanya data penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian disebut dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang berada di Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang yang berupa arsip LAKIP khususnya laporan capaian kinerja karyawan tahunan selama kurun waktu 4 tahun kebelakang mulai 2019 sampai 2022.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif deskriptif yaitu peneliti menyampaikan data dengan mendeskripsikan

hasil yang diperoleh dari pengolahan data lakip kpknl Malang dari tahun 2019-2022. Dalam penelitian ini mengacu pada teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik tersebut terdapat 4 (empat) tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi (Rijali 2019). Berikut uraian teknik analisis data tersebut:

1. Pengumpulan data

Langkah awal dalam melakukan analisis data adalah mengumpulkan data-data yang akan digunakan baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berasal dari observasi maupun pengamatan secara langsung pada kantor tersebut dan ditambah dengan hasil wawancara dengan informan yang berhubungan langsung mengenai laporan akuntabilitas kinerja dan penyusunan lakip yang ada pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang. Selain itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari data LAKIP KPKNL Malang dari tahun 2019-2022.

2. Reduksi data

Langkah kedua yang dilakukan peneliti dalam analisis data adalah mereduksi data. Reduksi data adalah proses menyederhanakan atau meringkas data-data yang telah didapatkan sebelumnya agar menjadi bentuk yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Malang dalam kurun waktu 4 tahun mulai tahun 2019 - 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)

mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja dilingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Perhitungan capaian kinerja sendiri menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target (tahun)}} \times 100$$

Cara agar lebih mudah untuk melihat serta menyimpulkan hasil dari pencapaian sasaran program kegiatan maka dilakukan penilaian dan disertai arti atau makna dari nilai tersebut yaitu:

Nilai		Makna
<80	:	Kurang
80-99	:	Cukup
100	:	Baik
>100	:	Sangat baik

3. Penyajian/ penampilan data

Menyajikan atau menampilkan data merupakan tahap penyatuan dari data-data yang telah direduksi atau disederhanakan sebelumnya. Data tersebut baik yang berasal dari wawancara dan lainnya akan dituangkan ke dalam uraian yang berbentuk teks. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahi apa yang terjadi serta dapat merencanakan langkah selanjutnya yang harus dikerjakan sesuai dengan yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memaparkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja LAKIP dari tahun 2019-2022, selain itu pemaparan data melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat dijadikan sebagai temuan baru yang sebelumnya mungkin masih belum ada. Pembaruan ini dapat berupa deskripsi dari objek yang sebelumnya masih terdapat keraguan. Membuat kesimpulan yang diambil dari data hasil penelitian. Pengrikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan melihat hasil analisis data lakip KPKNL Malang yang disajikan dengan mendeskripsikan hasil analisis.

3.7 Keabsahan Data

pengujian keabsahan data untuk mengukur apakah data dan proses pencariannya sudah benar. Adapun unsur-unsur yang dinilai adalah lama penelitian, proses observasi yang berlangsung, serta proses pelagaan data yang kita peroleh dari berbagai informan penelitian (Abdussamad 2021).

Pengertian Triangulasi yang di kutip oleh (Patton, 2002: 331) yaitu sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode/cara yang dipakai untuk mengkaji fenomena sosial yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda, teknik triangulasi meliputi empat tipe, yaitu:

1. Triangulasi sumber data, adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian
2. Triangulasi antar-peneliti atau biasa diistilahkan Triangulasi investigator (jika penelitian dilakukan secara berkelompok) penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda
3. Triangulasi metode, penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan dan dokumen dan sumber data

lainnya Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi (Haryoko M.Pd. 2020).

Pada penelitian ini menggunakan Triangulasi metode yaitu menggunakan hasil wawancara dan penjelasan dari kepala kantor KPKNL Malang yang digunakan sebagai penguat dari beberapa penjelasan karyawan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang yang mengurus dan membuat lakip KPKNL Malang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL Malang memiliki gedung kantor yang terletak di Jalan Sudanco Supriadi Nomor 157, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Malang. Gedung ini diresmikan pada tanggal 13 Agustus 2006.

Demi menjalankan tugasnya secara baik KPKNL Malang dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja.

4.1.2 Tugas dan fungsi KPKNL Malang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPKNL Malang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, KPKNL Malang dibagi dalam struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Sub bagian Umum
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN)
- c. Seksi Pelayanan Lelang
- d. Seksi Piutang Negara
- e. Seksi Pelayanan Penilaian
- f. Seksi Hukum dan Informasi (HI)
- g. Seksi Kepatuhan Internal (KI) dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengkoordinasian penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeriksaan dokumen, pengadaan, pengamanan, pengelolaan, pemanfaatan, status penguasaan, analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan, penatausahaan dan penyusunan daftar kekayaan negara.

c. Seksi Pelayanan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan pelaksanaan tugas penilaian;

d. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan PH dan / atau, pemblokiran, eksekusi barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang Negara, inventarisasi piutang Negara, pemeriksaan barang jaminan milik PH, serta inventarisasi, registrasi, pengamanan, pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan.

e. Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang,

pembukuan, penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan dan grosse risalah lelang, penggalan potensi lelang, pelaksanaan superintendensi Pejabat Lelang serta pengawasan Balai Lelang.

f. Seksi Hukum dan Informasi

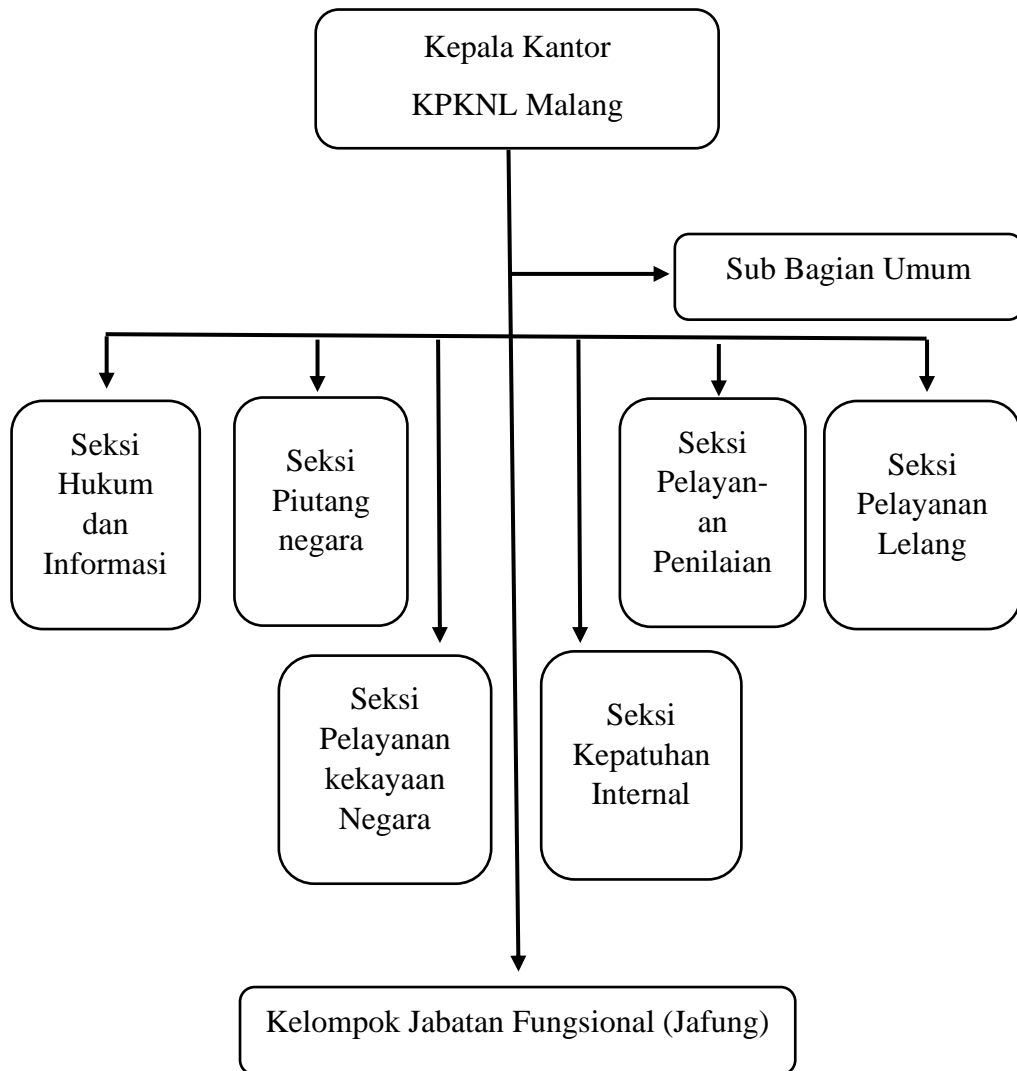
Mempunyai tugas melakukan registrasi dan penatausahaan penatausahaan berkas kasus piutang negara, pencatatan surat permohonan lelang, penyajian informasi, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

g. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

4.1.3 Struktur organisasi KPKNL Malang

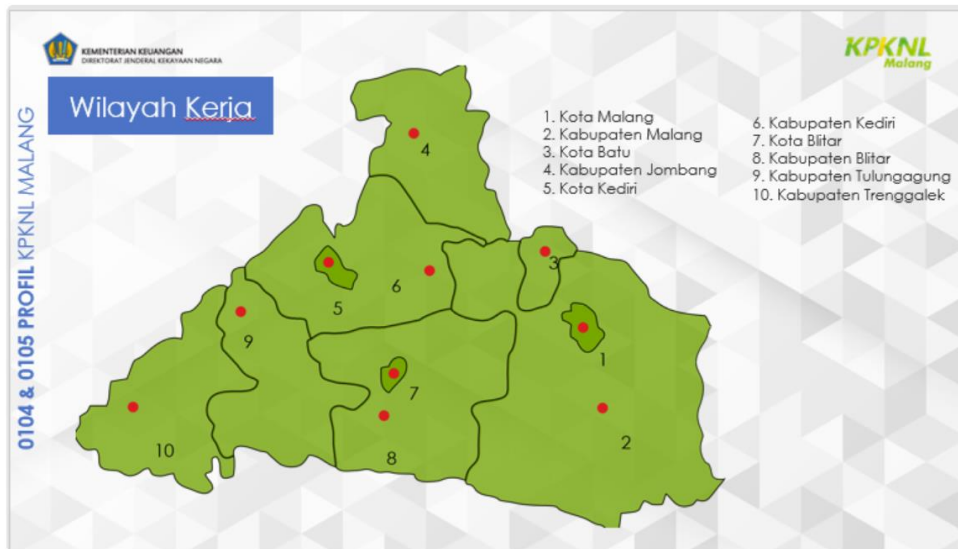
Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPKNL Malang



Sumber : Data yang diolah, 2023

4.1.4 Wilayah kerja KPKNL Malang

Gambar 4.2
Wilayah Kerja Berdasarkan Peta
KPKNL Malang



Sumber : KPKNL Malang, 2023

Wilayah kerja KPKNL Malang sendiri tidak hanya pada Kota dan Kabupaten Malang saja namun memiliki wilayah kerja yang sangat luas yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek.

Adanya wilayah seluas itu membuat tantangan tersendiri bagi karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang untuk dapat bekerja secara maksimal dan tetap mengedepankan motto mereka yaitu MBOIS yang ternyata merupakan akronim dari Melayani tekadku, Bersih jiwaku, Optimis semangatku, Inovatif ideku, dan Sinergi kerjaku.

4.1.5 Rincian Pegawai KPKNL Malang

KPKNL Malang didukung oleh 40 (empat puluh) orang pegawai, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1
Rincian Pegawai KPKNL
Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jumlah Peg.	Jenis Kelamin	
			L	P
1.	Kepala Kantor	1	1	
2.	Subbagian Umum	15	12	3
3.	Seksi PKN	8	4	4
4.	Seksi Piutang Negara	5	3	2
5.	Seksi Hukum dan Informasi	6	3	3
6.	Seksi Kepatuhan Internal	5	2	3
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	8	6	2
	Jumlah	48	31	17

Sumber: KPKNL Malang, 2023

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4. 2
Rincian Pegawai KPKNL
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Jumlah Peg.	Tingkat Pendidikan							
			S3	S2	S1/D4	D2	D1	SMA	SMP	SD
1.	Kepala Kantor	1		1	1					
2.	Subbagian Umum	15				5		4		
3.	Seksi PKN	8		1	2	4		1		
4.	Seksi Piutang Negara	5			2		2	1		

No.	Unit Kerja	Jumlah Peg.	Tingkat Pendidikan							
			S3	S2	S1/D4	D2	D1	SMA	SMP	SD
5.	Seksi Hukum & Informasi	6		1	4	1				
6.	Seksi Kepatuhan Internal	5			1	3	1			
7.	Kelompok Jabatan Fungsional	8		3	5					
8.	Jumlah	48		6	19	14	3	6		

Sumber: KPKNL Malang, 2023

c. Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pelelang : 4 Orang
2. Penilai Pemerintah : 3 Orang
3. Pranata Keuangan APBN : 1 Orang

4.1.6 Pembuatan lakip

Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dalam pembuatan lakip memerlukan waktu kurang lebih satu bulan dalam penyusunan hingga pelaporannya. Terdapat beberapa data yang dibutuhkan tim penyusun lakip dalam pembuatannya yaitu mulai dari data struktur organisasi kantor, hingga data capaian kinerja yang didapat dalam kurun waktu satu tahun.

“Untuk waktu yang dibutuhkan sendiri melihat dari data yang terkumpul dari semua seksi yang ada pada KPKNL, biasanya kami melakukan penyusunan kurang lebih 1 bulan dan bisa dikirimkan kepada kanwil untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian” (Wawancara tanggal 26 Mei 2023).

Berikut ada hasil wawancara mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyusun lakip pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang menurut penuturan dari Bu Firda selaku pelaksana seksi kepatuhan internal. Menurut

penuturannya pembuatan lakip juga mempunyai beberapa kendala salah satunya yaitu dari lamanya seksi dalam mengirimkan data data yang diperlukan dalam pembuatan lakip.

“Untuk pemeriksaan biasanya dilakukan oleh kanwil DJKN yang dilakukan secara berkala tiap tahun yaitu dari bidang KIH (kepatuhan internal dan hukum informasi) sedangkan untuk penilaian hanya dari ketepatan waktu pembuatan dan pengumpulan lakip saja” (wawancara 26 Mei 2023).

“Untuk bagian yang dilakukan pemeriksaan itu semua indikator kinerja karyawan yang ada dan juga hasil apakah sudah baik atau masih ada yang perlu peningkatan kedepannya” (wawancara 26 Mei 2023).

Sedangkan pada hasil lakip juga dilakukan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh Kanwil DJKN yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Dalam pelaporan lakip ada pemeriksaan yang dilakukan oleh kanwil DJKN, bagian yang diperiksa dalam lakip tersebut adalah semua indikator kinerja karyawan yang ada dan juga hasil apakah sudah baik atau masih ada yang perlu peningkatan kedepannya.

4.1.7 Kinerja Karyawan saat Covid-19

Pada saat pandemi covid-19 pemerintah republik Indonesia menerapkan pembatasan beraktivitas atau yang biasa disebut dengan *lock down*. Adanya covid-19 membuat sebagian sektor di Indonesia serasa mati suri karena masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan mudah, begitu pula dengan KPKNL Malang yang sangat merasakan dampak dari adanya covid-19.

“Pandemi covid-19 menghambat kinerja dari pegawai kpknl karena pada saat itu semua pekerjaan dilakukan dengan daring saja dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan para satker dan hal hal tersebut yang menyebabkan hasil kinerja dapat turun” (Wawancara 26 Mei 2023).

4.2 Data Hasil Penelitian

4.2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Analisis kinerja sangat diperlukan untuk bisa mengetahui realisasi, pencapaian, ataupun kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian misi melalui sasaran yang diimplementasikan dalam kegiatan maupun program yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Monitoring dan evaluasi kinerja sangatlah penting untuk melihat dan menilai bagaimana proses untuk mencapai tujuan untuk memperbaiki dan melaksanakan program dimasa mendatang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dalam melihat keberhasilan maupun kegagalan yang ada melalui evaluasi kinerja mengenai faktor-faktor penunjang keberhasilan, maupun penyebab kegagalan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Kegiatan pengukuran kinerja didahului dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi.

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah rangkaian dari beberapa plan atau rencana tindakan yang bersifat mendasar dan dibuat secara efisien serta koordinatif dan disusun mengikuti alur pikir tertentu.

Sasaran strategis yang biasa diterapkan di KPKNL Malang yaitu:

- a. Peningkatan pengelolaan kekayaan negara
- b. Peningkatan pengurusan piutang negara
- c. Pengurusan pelayanan penilaian
- d. Peningkatan pelayanan lelang

e. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja yaitu dokumen yang berisi mengenai penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

3. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja KPKNL Malang dalam kurun waktu 4 tahun mulai tahun 2019 - 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja dilingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Perhitungan capaian kinerja sendiri menggunakan rumus:

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target (tahun)}} \times 100$$

Rincian dibawah ini menjelaskan bahwa ada 4 batasan Nilai Prestasi Kerja Pegawai (NPKP) mulai dari angka dibawah 80% sampai diatas 100%, meskipun hasil tersebut dalam kategori cukup akan tetapi pada kenyataannya indikator yang mendapatkan nilai persentase dibawah 100% masih dianggap kurang karena tidak dapat mencapai target.

Cara agar lebih mudah untuk melihat serta menyimpulkan hasil dari pencapaian sasaran program kegiatan maka dilakukan penilaian dan disertai arti atau makna dari nilai tersebut yaitu:

Nilai		Makna
<80	:	Kurang
80-99	:	Cukup
100	:	Baik
>100	:	Sangat baik

4.2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2019-2022

Tabel 4.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal	100%	104,72%	104,72%
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara • Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi 	100%	141,18%	141,18%
2	Pelayanan publik yang prima	4,3	4,60	106,98%
3	Kepatuhan yang tinggi atas kebijakan pengelolahan kekayaan negara	80	85,76	107,20%
	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN 			
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas	80	95,31	119,14%
5	Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel	100%	126,42%	126,42%
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 	90%	100%	111,11%
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian koreksi nilai BMN • Persentase objek BMN yang telah direvaluasi 	100%	107,67%	107,67%
6	Tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel	100%	104,72%	104,72%
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase hasil pengurusan piutang negara 	100%	86,40%	86,40%
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase hasil lelang • Persentase produktifitas lelang 	30%	31,99%	106,63%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
7	Edukasi yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi 	85	87,11	102,48%
8	Pengawasan dan pengendalian yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN • Persentase rekomendasi itjen yang ditindaklanjuti 	50% 100%	56% 100%	112% 100%
9	SDM yang kompetitif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pemenuhan standar hard competency 	90%	96%	106,67%
10	Organisasi yang fit-for-purpose <ul style="list-style-type: none"> • Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja 	70	96,56	137,94%
11	Sistem manajemen informasi yang andal <ul style="list-style-type: none"> • Persentase implementasi e-auction 	85%	96,24%	113,22%
12	Pengelolaan anggaran yang optimal <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 	95%	103,64%	109,09%

Sumber : Data LAKIP KPKNL Malang, 2023

Capaian Kinerja 2019

Pada hasil capaian kinerja Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara tahun 2019 dapat tercapai sebesar 104,72% dan termasuk dalam kategori sangat baik, selain itu ada juga persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi tercapai sebesar 141,18% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja kedua yaitu pelayanan publik yang prima terdiri dari satu indikator adalah indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL yang tercapai sebesar 106,98% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada hasil capaian kinerja ketiga yaitu kepatuhan yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang mempunyai satu indikator yaitu rata-rata indeks

ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN tercapai sebesar 107,20% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil capaian keempat yaitu manajemen pelayanan yang berkualitas mempunyai satu indikator saja yaitu rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara tercapai sebesar 119,14% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja kelima yaitu tata kelola piutang negara yang akuntabel mempunyai 3 indikator, yang pertama yaitu persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tercapai sebesar 126,42% dan termasuk dalam kategori sangat baik, selanjutnya yaitu persentase penyelesaian koreksi nilai BMN sebesar 111,11% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan yang terakhir yaitu persentase obyek BMN yang telah direvaluasi tercapai sebesar 107,63% dan termasuk dalam kategori sangat baik, pada poin ini dapat tercapai karena seksi pelayanan kekayaan negara KPKNL Malang melakukan kinerja yang sangat baik dengan melakukan peninjauan dan penilaian kembali aset yang dimiliki satker sehingga mencerminkan dan menggambarkan nilai aset yang sekarang.

Pada capaian kinerja keenam yaitu tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel dengan 3 indikator kinerja yaitu persentase hasil pengurusan piutang negara tercapai sebesar 104,72% dan termasuk dalam kategori sangat baik, pengurusan piutang negara dapat tercapai karena banyak dari satker-satker pendidikan khususnya seperti perguruan tinggi negeri (Universitas Brawijawa, Universitas Negeri Malang) yang mengajukan untuk pengurusan piutang negara kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang. Pada indikator kedua

persentase hasil lelang tercapai sebesar 86,40% dan termasuk dalam kategori kurang karena persentase yang didapat kurang dari 100%, hasil lelang hanya tercapai sebesar 86,40% atau tidak memenuhi target karena pada saat itu masih banyak dari satker-satker yang belum faham dan takut maupun merasa sulit untuk melakukan penghapusan aset negara maupun BMN yang sudah usang atau habis masa pakai kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Hal ini yang pada tahun selanjutnya KPKNL Malang memakai banyak cara agar realisasi target hasil lelang dapat terpenuhi salahsatunya dengan cara mendatangi langsung kekantor satker-satker yang berpotensi untuk melakukan penghapusan maupun pelelangan BMN, selain itu penyebab tidak tercapainya hasil lelang pada tahun 2019 yaitu karena masih sedikitnya frekuensi atau potensi lelang pada tahun tersebut yang berimbas pada tidak tercapainya target hasil lelang. Indikator yang terakhir yaitu persentase produktifitas lelang tercapai sebesar 106,63% dan termasuk dalam kategori sangat baik, produktifitas lelang dapat tercapai karena perbandingan antara jumlah realisasi frekuensi lelang yang lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi lelang laku yang lebih sedikit dalam kurun waktu satu tahun.

Selanjutnya yaitu capaian kinerja 7 berisi edukasi yang efektif dimana berisikan satu indikator saja yaitu tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 102,48% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada capaian kinerja kedelapan yaitu pengawasan dan pengendalian yang efektif berisi 2 indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN tercapai sebesar 112% dan termasuk dalam

kategori sangat baik, yang kedua yaitu persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti tercapai sebesar 100% dan termasuk dalam kategori baik karena memperoleh persentase diangka 100%.

Capaian kinerja kesembilan yaitu SDM yang kompetitif memiliki satu indikator saja yaitu persentase pemenuhan standar *hard competency* yang tercapai sebesar 106,67% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada capaian kinerja kesepuluh yaitu organisasi yang *fit-for-purpose* juga memiliki satu indikator saja yaitu nilai hasil reviu pengelolaan kinerja yang tercapai sebesar 137,94% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada capaian kinerja kesebelas yaitu sistem manajemen informasi yang andal hanya memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase implementasi e-auction yang dapat tercapai dengan persentase sebesar 113,22% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja keduabelas yaitu pengelolaan anggaran yang optimal hanya memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 109,09% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4. 4
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal			
	• Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	109,44%	109,44%
	• Tingkat Penurunan outstanding piutang negara	3%	3,87%	129%
	• Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN	100%	100,00%	100%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien <ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL 	4,60	4,70	102,17%
3	Pengelolaan lelang yang optimal <ul style="list-style-type: none"> • Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) 	100%	107,56%	107,56%
4	Manajemen pelayanan yang berkualitas <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang 	90	97,27	108,08%
5	Tata kelola kekayaan negara yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan • Persentase efektivitas penyelesaian BKPN • Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi • Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 	100% 100% 100% 100%	100,00% 131,44% 125,18% 138,54%	100% 131,44% 125,18% 138,54%
6	Penilaian yang berkualitas <ul style="list-style-type: none"> • Deviasi ketergunaan hasil penilaian 	30%	0,00%	0%
7	Tata kelola lelang yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase produktivitas lelang • Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i> 	34% 90%	41,03% 98,10%	120,68% 109%
8	Edukasi yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 	92	96,22	104,59%
9	Pengawasan dan pengendalian yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset • Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN 	80% 100%	96,97% 101,67%	121,21% 101,67%
10	SDM yang kompeten <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembangan kompetensi pegawai 	100%	120,00%	120%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC • Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai 	70 80	79,62 96,94	113,74% 121,18%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
12	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 	95%	96,30%	101,37%

Sumber : Data LAKIP KPKNL Malang, 2023

Capaian Kinerja 2020

Pada hasil capaian kinerja pertama yaitu pengelolaan kekayaan negara yang optimal terdapat 3 indikator yaitu persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 109,44% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dapat tercapai karena bersumber dari aset yang bisa berupa tanah maupun bangunan maupun barang milik negara (BMN) yang sudah usang atau habis masa pakai dan akan dihapuskan maupun dilelang untuk umum melalui web lelang.go.id yang selanjutnya dana dari hasil lelang atau penghapusan tersebut akan dikembalikan kepada negara. Selanjutnya ada persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 100% dan termasuk dalam kategori baik karena mencapai persentase 100%, kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) tercapai karena banyak berfokus kepada BMN pada satker Kementerian Keuangan, hal ini disebabkan oleh banyak dari satker Kemenkeu yang menggunakan BMN sesuai dengan masa pakai dan standar sesuai peraturan yang ada. Indikator terakhir yaitu persentase penurunan outstanding piutang negara yang tercapai sebesar 129% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada hasil capaian kedua yaitu manajemen pelayanan yang berkualitas indikatornya hanya satu saja yaitu Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL tercapai

sebesar 108,08%. Dalam capaian kinerja ketiga (Birokrasi dan layanan publik yang efektif dan efisien) juga hanya satu indikator saja yaitu indeks kepuasan layanan KPKNL tercapai sebesar 102,17% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja keempat yaitu pengelolaan lelang yang optimal juga hanya terdiri dari satu indikator kinerja yaitu persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 107,56% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Realisasi pokok lelang dapat tercapai karena sudah banyak dari satker-satker yang faham dan mau untuk melakukan penghapusan aset negara maupun BMN yang sudah usang atau habis masa pakai kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, selain itu sudah tidak adanya kegagalan dalam pelaksanaan lelang membuat realisasi lelang dapat tercapai dengan sangat baik.

Pada capaian kinerja kelima yaitu ata kelola piutang negara dan lelang yang efektif terdiri dari 4 indikator kinerja yang semuanya sudah memenuhi target dengan rincian yang pertama yaitu persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tercapai sebesar 100% dan termasuk dalam kategori baik karena karena penanganan dari pegawai kpknl Malang yang baik dan dapat memperoleh persentase diangka 100%, yang kedua persentase efektifitas penyelesaian BKPN tercapai sebesar 131,44% dan termasuk dalam kategori sangat baik, yang ketiga persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi tercapai sebesar 125,18% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan yang terakhir persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 138,54% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian Kinerja keenam yaitu tata kelola lelang yang efektif terdapat 2 indikator kinerja yang memperoleh hasil yang sangat baik dengan persentase produktivitas lelang tercapai sebesar 120,68% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan Persentase pelaksanaan lelang *e-audition* dan *e-conventional auction* tercapai sebesar 109% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Produktivitas lelang dapat mencapai target karena sudah banyak dari satker-satker yang faham dan mau untuk melakukan penghapusan aset negara maupun BMN yang sudah usang atau habis masa pakai kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Selain itu KPKNL Malang juga secara rutin mengadakan webinar maupun seminar offline yang mengangkat mengenai tata cara penghapusan BMN bagi satker-satker yang BMN nya sudah usang atau habis masa pakai. Persentase pelaksanaan lelang *e-audition* dan *e-conventional auction* tercapai karena lelang sendiri sudah menerapkan sistem full online yang dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia di web lelang.go.id dan bisa langsung melakukan pendaftaran dan ikut lelang baik *openbidding* maupun *closebidding*.

Pada capaian ketujuh (edukasi yang efektif) indikator kinerjanya hanya terdiri dari satu indikator yaitu tingkat efektifitas edukasi yang efektif tercapai sebesar 104,59% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Edukasi yang efektif dapat tercapai karena pihak KPKNL Malang sering melakukan sosialisasi secara langsung dengan cara mendatangi ke kantor satker-satker untuk memberikan edukasi terkait program kerja seperti penghapusan aset negara, pelelangan BMN, pengurusan piutang negara dan lain-lain.

Hasil capaian kinerja kedelapan dalam hal ini persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pengembangan kompetensi pegawai dapat tercapai karena dari pihak KPKNL sendiri sering melakukan monitoring secara berkala dan rapat evaluasi setiap minggunya guna membahas mengenai pengembangan dan kualitas pegawai yang ada.

Pada capaian kinerja kesembilan yaitu organisasi yang fit for purpose terdiri dari 2 indikator kinerja yang dua-duanya memperoleh hasil persentase yang sangat baik dengan rincian hasil indikator nilai hasil review pengelolaan kinerja tercapai sebesar 113,74% dan termasuk dalam kategori sangat baik, dan indikator indeks evektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator tercapai sebesar 121,18% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada capaian kinerja kesepuluh yaitu pengawasan dan pengendalian yang efektif terdapat 2 indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset tercapai sebesar 121,21% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan indikator persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN tercapai sebesar 101,67% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada capaian ke duabelas yaitu pengelolaan keuangan yang optimal indikator yang ada hanya satu yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 101,37% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4. 5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal			
	• Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62%	84,44%	136,19%
	• Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	121,37%	121,37%
	• Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	306,13%	306,13%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			
	• Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL	90%	99,95%	111,06%
	• Persentase realisasi pokok lelang	100%	147,73%	147,73%
3	Birokrasi dan layanan publik yang agie, efektif dan efisien			
	• Indeks kepuasan layanan KPKNL	4,6	4,71	102,39%
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif			
	• Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan	100%	100%	100%
	• Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN	100%	127,7%	127,7%
	• Deviasi ketergantungan hasil penilaian	22%	0,04%	0,18%
5	Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif			
	• Persentase eektifitas penyelesaian BKPN	100%	147,92%	147,92%
	• Persentase produktivitas lelang	35%	45,35%	129,57%
	• Persentase pelaksanaan lelang e-audition dan e-conventional auction	92%	97,18%	105,63%
	• Deviasi data PNPB fungsional DJKN	12,50%	0,00%	0%
6	Edukasi yang efektif			
	• Tingkat efektifitas edukasi yang efektif	92%	93,53%	101,66%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif			
	• Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	97,20%	114,35%
8	SDM yang kompeten			
	• Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
9	Organisasi yang fit for purpose			
	• Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75%	96,73%	128,97%
	• Nilai hasil review pengelolaan kinerja	75%	90,92%	121,23%
	• Indeks evektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator	80%	97,30%	121,63%
10	Pengelolaan keuangan yang optimal			
	• Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,05%	99,5%

Sumber : Data LAKIP KPKNL Malang, 2023

Capaian Kinerja 2021

Hasil capaian kinerja pertama yaitu pengelolahan kekayaan negara yang optimal dibagi lagi kedalam 3 indikator yaitu tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang tercapai sebesar 136,19% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) tercapai karena banyak berfokus kepada BMN pada satker Kementerian Keuangan, hal ini disebabkan oleh banyak dari satker Kemenkeu yang menggunakan BMN sesuai dengan masa pakai dan standar sesuai peraturan yang ada. Indikator kedua yaitu persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tercapai sebesar 121,37% dan termasuk dalam kategori sangat baik, penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dapat tercapai karena bersumber dari aset yang bisa berupa tanah maupun bangunan maupun barang milik negara (BMN) yang sudah usang atau habis masa pakai dan akan dihapuskan maupun dilelang untuk umum melalui web lelang.go.id yang selanjutnya dana dari hasil lelang atau penghapusan tersebut akan dikembalikan kepada negara. Persentase penurunan outstanding piutang negara adalah indikator terakhir dan dapat tercapai sebesar 306,13% termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada capaian kinerja kedua yaitu pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa terdiri dari 2 indikator yaitu indeks ketepatan waktu layanan KPKNL tercapai sebesar 111,06% dan termasuk dalam kategori sangat baik, selain itu juga ada indikator persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 147,73% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Realisasi pokok lelang dapat tercapai karena sudah banyak dari satker-satker yang faham dan mau untuk melakukan penghapusan aset negara maupun BMN yang sudah usang atau habis masa pakai kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang.

Pada capaian kinerja ketiga yaitu birokrasi dan layanan publik efektif dan efisien hanya ada satu indikator yaitu indeks kepuasan layanan KPKNL tercapai sebesar 102,39% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Berbeda pada capaian sebelumnya, dicapaian kinerja keempat ini yaitu penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif terdiri dari 2 indikator yaitu persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan tercapai sebesar 100% dan termasuk dalam kategori baik karena memperoleh persentase sebesar 100%. Selain itu juga ada persentase implementasi evaluasi kinerja BMN tercapai sebesar 127,7% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada capaian kinerja kelima yaitu atau kelola piutang negara dan lelang yang efektif terdapat 3 indikator dimana terdiri dari persentase evektifitas penyelesaian BKPN yang tercapai sebesar 147,92% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan persentase produktivitas lelang yang tercapai sebesar 129,57% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Produktivitas lelang dapat mencapai target karena sudah banyak dari satker-satker yang faham dan mau untuk melakukan penghapusan aset

negara maupun BMN yang sudah usang atau habis masa pakai kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Selain itu KPKNL Malang juga secara rutin mengadakan webinar maupun seminar offline yang mengangkat mengenai tata cara penghapusan BMN bagi satker-satker yang BMN nya sudah usang atau habis masa pakai. Indikator terakhir yaitu persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction tercapai sebesar 105,63% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam hal ini dapat tercapai karena lelang sendiri sudah menerapkan sistem full online yang dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia di web lelang.go.id dan bisa langsung melakukan pendaftaran dan ikut lelang baik *openbidding* maupun *closebidding*.

Pada capaian kinerja keenam yaitu edukasi yang efektif terdapat satu indikator saja yaitu tingkat efektifitas edukasi yang efektif tercapai sebesar 101,66% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Edukasi yang efektif dapat tercapai karena pihak KPKNL Malang sering melakukan sosialisasi secara langsung dengan cara mendatangi ke kantor satker-satker untuk memberikan edukasi terkait program kerja seperti penghapusan aset negara, pelelangan BMN, pengurusan piutang negara dan lain-lain.

Pada capaian kinerja ketujuh yaitu pengawasan dan pengendalian yang efektif juga terdapat satu indikator saja yaitu persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara yang tercapai sebesar 114,35% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja kedelapan yaitu SDM yang kompeten juga memiliki indikator satu saja yaitu persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pengembangan

kompetensi pegawai dapat tercapai karena dari pihak KPKNL sendiri sering melakukan monitoring secara berkala dan rapat evaluasi setiap minggunya guna membahas mengenai pengembangan dan kualitas pegawai yang ada.

Dalam capaian kinerja kesembilan yaitu organisasi yang fit for purpose terdiri dari 2 indikator yaitu nilai hasil review pengelolaan kinerja tercapai sebesar 121,23% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan indeks epektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator tercapai sebesar 121,63% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja terakhir atau kesepuluh yaitu pengelolaan keuangan yang optimal juga satu indikator saja yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 99,5% dan termasuk dalam kategori cukup karena persentase yang didapatkan hanya sebesar 99,5%, hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut menerapkan formulasi terbaru yaitu formulasi *smart* dari DJPb dimana menghitung penggunaan dana dan efisiensi, meskipun begitu indikator pengelolaan keuangan yang optimal ditahun tersebut masih bisa dikatakan kurang karena tidak memenuhi target.

Tabel 4. 6
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	100%	121,12%	121,12%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Persentase produktivitas lelang 	36%	38,32%	106,44%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa <ul style="list-style-type: none"> Persentase Realisasi Pokok Lelang Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara 	100% 100%	115,27% 668,75%	115,27% 668,75%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi <ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL 	4,61	4,81	104,34%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) 	65% 100% 100% 100%	86,59% 128,08% 147% 120%	133,22% 128,08% 147% 120%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional <ul style="list-style-type: none"> Deviasi ketergunaan hasil penilaian 	19%	0%	0%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif <ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i> Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN 	92% 10%	98,12% 0%	106,65% 0%
7	Edukasi yang Efektif <ul style="list-style-type: none"> Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 	92	95,24	103,52%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif <ul style="list-style-type: none"> Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara 	85%	96,15%	113,12%
9	SDM yang Kompeten <ul style="list-style-type: none"> Persentase pengembangan kompetensi pegawai 	100%	120%	120%
10	Organisasi yang Fit For Purpose <ul style="list-style-type: none"> Nilai review pengelolaan kinerja 	80 90	91,18 98,46	113,98% 109,40%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 			
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kualitas pelaksanaan anggaran • Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan 	95,5% 100%	95,86% 159,67%	100,38% 159,67%

Sumber : Data LAKIP KPKNL Malang, 2023

Capaian Kinerja 2022

Hasil capaian kinerja pertama yaitu peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang berisi 2 indikator yaitu Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 121,12% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Selain itu ada juga persentase produktivitas lelang yang bisa tercapai sebesar 106,44% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Hasil capaian kinerja kedua yaitu pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa yang berisi 2 indikator yaitu persentase Realisasi Pokok Lelang tercapai sebesar 115,27% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai sebesar 668,75% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja ketiga yaitu kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi dimana hanya terdapat 1 indikator saja yaitu indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL yang tercapai sebesar 104,34% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Didalam capaian kinerja keempat yaitu pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal terdapat empat indikator yaitu tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 133,22% dan termasuk dalam kategori sangat

baik, selanjutnya yaitu persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan tercapai sebesar 128,08% dan termasuk dalam kategori sangat baik, yang ketiga yaitu persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai sebesar 147% dan termasuk dalam kategori sangat baik, dan yang terakhir yaitu persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) tercapai sebesar 120% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja kelima yaitu penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif hanya ada satu indikator kinerja yaitu persentase pelaksanaan lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* tercapai sebesar 106,65% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam capaian kinerja keenam yaitu edukasi yang efektif juga hanya satu indikator kinerja yaitu tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai sebesar 103,52% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam capaian kinerja ketujuh yaitu pengawasan dan Pengendalian yang efektif indikator kerjanya juga satu yaitu persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tercapai sebesar 113,12% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam capaian kinerja kedelapan yaitu SDM yang kompeten indikator yang ada hanya satu yaitu persentase pengembangan kompetensi pegawai tercapai sebesar 120% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Selanjutnya pada capaian kinerja kesembilan yaitu organisasi yang *fit for purpose* indikator kinerja ada 2 yaitu nilai *review* pengelolaan kinerja tercapai sebesar 113,98% dan termasuk dalam kategori sangat baik, dan indeks efektivitas pelaksanaan FGD pejabat administrator tercapai sebesar 109,40% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pada capaian kinerja kesepuluh yaitu penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal indikator kinerja ada 2 yaitu persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 100,38% dan termasuk dalam kategori sangat baik dan persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tercapai sebesar 159,67% dan termasuk dalam kategori sangat baik.

Tabel 4. 7
Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK • Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang • Persentase penurunan outstanding piutang negara 	141,18%	100%	136,19%	133,22%
		104,72%	109,43%	121,37%	121,12%
		141,18%	129,14%	306,13%	668,75%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL • Persentase realisasi hasil lelang 	106,98%	108,08%	111,06%	104,34%
		86,40%	107,56%	147,73%	115,27%
3	Birokrasi dan layanan publik yang agie, efektif dan efisien <ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan layanan KPKNL 	106,98%	102,17%	102,39%	104,34%
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan • Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN • Deviasi ketergantungan hasil penilaian 	126,42%	100%	100%	128,08%
		111,11%	138,54%	127,7%	120%
		107,67%	0,04%	0,18%	0%

No	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022
5	Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase evektifitas penyelesaian BKPN • Persentase produktivitas lelang • Persentase pelaksanaan lelang e-audition dan e-conventional auction 	104,72%	131,44%	147,92%	147%
		106,63%	120,68%	129,57%	115,27%
		-	109%	105,63%	106,65%
6	Edukasi yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektifitas edukasi yang efektif 	102,48%	0%	101,66%	103,53%
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara • Persentase tindak lanjut penyelesaian/ perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN 	100%	121,21%	114,35%	113,12%
		112%	101,67%	0%	0%
8	SDM yang kompeten <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pengembangan kompetensi pegawai 	106,67%	120%	120%	120%
9	Organisasi yang fit for purpose <ul style="list-style-type: none"> • Nilai hasil review pengelolaan kinerja • Indeks evektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator 	137,94%	113,74%	121,23%	123,98%
		-	121,18%	121,63%	109,40%
10	Pengelolaan keuangan yang optimal <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 	109,09%	101,37%	99,5%	100,38%

Sumber : Data yang diolah, 2023

Penjelasan:

Capaian Kinerja 1: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal

1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2019 tercapai sebesar 141,18% dan termasuk dalam kategori sangat baik, pada tahun selanjutnya yaitu 2020 tingkat kesesuaian penggunaan BMN tercapai sebesar 100% dan termasuk dalam kategori baik. Pada tahun selanjutnya yaitu 2021 tercapai sebesar 136,91% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan hanya saja tetap melampaui target dengan hasil persentase sebesar 133,22%.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif atau naik turun persentase capaian yang didapat.

2. Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tahun 2019 tercapai sebesar 104,72%, sedangkan pada tahun 2020 Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang bisa tercapai sebesar 121,37% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2021 Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang kembali naik diangka 121,37% akan tetapi pada tahun 2022 Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang mengalami penurunan namun tetap bisa melampaui target dengan hasil persentase sebesar 121,12%.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan

yang baik pada tahun 2019 hingga 2021 akan tetapi turun persentasenya ditahun 2022.

3. Persentase penurunan outstanding piutang negara tahun 2019 tercapai sebesar 141,18% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2020 Persentase penurunan outstanding piutang negaramemperoleh persentase sebesar 129,14% atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya tapi ditahun 2021 Persentase penurunan outstanding piutang negara kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan dengan memperoleh hasil persentase sebesar 306,13% bahkan kembali naik ditahun 2022 dengan persentase sebesar 668,75%.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase penurunan outstanding piutang negara dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif.

Capaian Kinerja 2: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa

1. Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL pada tahun 2019 tercapai sebesar 106,98%, ditahun 2020 Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL tercapai sebesar 108,08% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2021 Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL mengalami kenaikan lagi dengan persentase sebesar 111,06% tapi pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu dengan persentase sebesar 104,34%.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan yang baik pada tahun 2019 hingga 2021 akan tetapi turun persentasenya ditahun 2022.

2. Persentase realisasi pokok lelang tahun 2019 mendapat persentase sebesar 86,40% dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi pokok lelang tersebut tidak memenuhi target. Tahun 2020 Persentase realisasi pokok lelang mendapat persentase sebesar 107,56% sedangkan pada tahun 2021 Persentase realisasi pokok lelang dapat tercapai sebesar 147,73% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Tahun 2022 Persentase realisasi pokok lelang kembali mengalami penurunan dimana mendapat persentase sebesar 115,27%.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Realisasi pokok lelang dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif atau naik turun persentase capaian yang didapat.

Capaian Kinerja 3: Birokrasi dan layanan publik efektif dan efisien

1. Indeks kepuasan layanan KPKNL tahun 2019 tercapai sebesar 106,98% dan tergolong sangat baik, ditahun 2020 Indeks kepuasan layanan KPKNL memperoleh persentase sebesar 102,17% yaitu mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, ditahun 2021 Indeks kepuasan layanan KPKNL meningkat dibanding tahun 2020 dengan persentase sebesar 102,39% tapi masih dibawah perolehan tahun 2019, dan ditahun 2022 Indeks kepuasan layanan KPKNL mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 104,34%

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Indeks kepuasan layanan KPKNL dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif atau naik turun persentase capaian yang didapat.

Capaian Kinerja 4: Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif

1. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan tahun 2019 tercapai sebesar 126,42% dan tergolong sangat baik, pada tahun berikutnya yaitu 2020 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan memperoleh persentase sebesar 100%, sama halnya dengan tahun 2020, perolehan Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan ditahun juga 100% dan termasuk dalam kategori baik karena memperoleh persentase sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan memperoleh hasil yang sangat baik dengan persentase sebesar 128,08%
2. Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN tahun 2019 memperoleh persentase sebesar 111,11% dan pada tahun 2020 kembali naik dengan perolehan sebesar 138,54% dan tergolong sangat baik, selanjutnya ditahun 2021 Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN memperoleh persentase sebesar 127,7% tetapi turun lagi ditahun 2022 diangka 120%.

Jadi bisa disimpulkan bahwa Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN mengalami kenaikan ditahun 2020 akan tetapi turun tahun 2021 dan 2022.

Capaian Kinerja 5: Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif

1. Persentase evektifitas penyelesaian BKPN tahun 2019 tercapai sebesar 104,72% sedangkan ditahun 2020 memperoleh persentase sebesar 131,44% dan mengalami kenaikan. Tahun 2021 evektifitas penyelesaian BKPN juga mengalami kenaikan dengan hasil sebesar 147,92% dan termasuk dalam kategori sangat baik tetapi pada tahun 2022 evektifitas penyelesaian BKPN mengalami penurunan dengan hasil 147% saja.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase evektifitas penyelesaian BKPN dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan yang baik pada tahun 2019 hingga 2021 akan tetapi turun persentasenya ditahun 2022.

2. Persentase produktivitas lelang ditahun 2019 tercapai sebesar 106,63%, selanjutnya ditahun 2020 Persentase produktivitas lelang naik dengan 120,68%, hasil yang sangat baik juga diraih pada tahun 2021 dimana persentase yang dicapai adalah sebesar 129,57% tetapi hasil menurun ditahun 2022 dengan persentase sebesar 115,27%.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase produktivitas lelang dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan yang baik pada tahun 2019 hingga 2021 akan tetapi turun persentasenya ditahun 2022.

Capaian Kinerja 6: Edukasi yang efektif

1. Tingkat efektifitas edukasi yang efektif pada tahun 2019 memperoleh persentase sebesar 102,48% tetapi turun ditahun 2021 dengan persentase sebesar 101,66%, baru ditahun 2022 mengalami kenaikan dengan hasil sebesar 103,53%.

Edukasi yang efektif dapat tercapai karena pihak KPKNL Malang sering melakukan sosialisasi secara langsung dengan cara mendatangi ke kantor satker-satker untuk memberikan edukasi terkait program kerja seperti penghapusan aset negara, pelelangan BMN, pengurusan piutang negara dan lain-lain.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Tingkat efektifitas edukasi yang efektif dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif.

Capaian Kinerja 7: Pengawasan dan pengendalian yang efektif

1. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2019 tercapai sebesar 100% dan mengalami kenaikan capaian ditahun 2020 dengan persentase sebesar 121,21%. Selanjutnya tahun 2021 mengalami penurunan dengan hasil sebesar 114,35%, dan ditahun 2022 juga kembali mengalami penurunan dengan hasil sebesar 113,12%.

Dapat disimpulkan bahwa hasil persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara tahun 2020 mengalami kenaikan tetapi kembali turun ditahun 2021 dan 2022.

2. Persentase tindak lanjut penyelesaian/ perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN ditahun 2019 memperoleh hasil sebesar 112% lalu turun ditahun 2020 dengan persentase sebesar 101,67%, ditahun 2021 dan 2022 Persentase tindak lanjut penyelesaian/ perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN tidak termasuk dalam perhitungan indikator kinerja karena mulai 2021 terdapat kebijakan baru yang menghapus dan menyempurnakan indikator-indikator yang ada.

Capaian Kinerja 8: SDM yang kompeten

1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2019 memperoleh hasil sebesar 106,67% dan mengalami kenaikan ditahun 2020-2022 dengan hasil yang sama yaitu sebesar 120%.

Capaian Kinerja 9: Organisasi yang fit for purpose

1. Nilai hasil review pengelolaan kinerja tahun 2019 tercapai sebesar 137,94% dan mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 113,74%. Pada tahun 2021 Nilai hasil review pengelolaan kinerja tercapai sebesar 121,23% dan termasuk dalam

kategori sangat baik. Tahun 2022 mengalami kenaikan kembali dengan persentase sebesar 123,98%

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Nilai hasil review pengelolaan kinerja dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif.

2. Indeks epektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator tahun 2020 tercapai sebesar 121,18%, dan mengalami kenaikan ditahun 2021 dengan persentase sebesar 121,63% tetapi turun ditahun 2022 dengan persentase sebesar 109,40%. Dapat disimpulkan bahwa Indeks epektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator tahun 2021 mengalami kenaikan tetapi kembali turun ditahun 2022.

Capaian Kinerja 10: Pengelolaan keuangan yang optimal

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2019 tercapai sebesar 109,09% tetapi mengalami penurunan ditahun 2020 dengan capaian sebesar 101,37%. Pada tahun 2021 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tercapai sebesar 99,5% dan termasuk dalam kategori cukup karena persentase yang didapatkan hanya sebesar 99,5%. Tahun 2022 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mendapat persentase sebesar 100,38% dimana tergolong kategori baik karena masih dibawah 101%.

Dari hasil yang didapat diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dari tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif.

4.2.2 Perbandingan Hasil Akuntabilitas Kinerja 2019-2022

Agar lebih mudah untuk melihat serta menyimpulkan hasil dari pencapaian sasaran program kegiatan maka dilakukan penilaian dan disertai arti atau makna dari nilai tersebut yaitu:

Nilai		Makna
<80	:	Kurang
80-99	:	Cukup
100	:	Baik
>100	:	Sangat baik

Rincian diatas mengungkapkan bahwa ada 4 batasan Nilai Prestasi Kerja Pegawai (NPKP) dimana mulai dari angka dibawah 80% sampai diatas 100%, meskipun hasil tersebut dalam kategori cukup akan tetapi pada kenyataannya indikator yang mendapatkan nilai persentase dibawah 100% masih dianggap kurang karena tidak dapat mencapai target berdasarkan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Setelah melihat dari data perhitungan diatas maka peneliti menyimpulkan hasil dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8
Analisis Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
1	Pengelolahan kekayaan negara yang optimal <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK • Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang • Persentase penurunan outstanding piutang negara 				√				√				√				√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa <ul style="list-style-type: none"> • Indeks ketepatan waktu layanan KPKNL • Persentase realisasi hasil lelang 				√				√				√				√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
3	Birokrasi dan layanan publik																

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
	yang agie, efektif dan efisien <ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepuasan layanan KPKNL 				√				√				√				√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
4	Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase bidang tanah BMN yang disertifikasikan • Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN • Deviasi ketergantungan hasil penilaian 				√			√				√					√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
5	Tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif <ul style="list-style-type: none"> • Persentase evektifitas penyelesaian BKPN • Persentase produktivitas lelang • Persentase pelaksanaan lelang <i>e-audition</i> dan <i>e-</i> 				√			√				√					√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
	<i>conventional auction</i>																
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
6	Edukasi yang efektif • Tingkat efektifitas edukasi yang efektif				√								√				√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
7	Pengawasan, pengendalian yang efektif • Persentase tindak lanjut persetujuan dan pengelolaan kekayaan negara • Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali bmn			√				√				√				√	
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
8	SDM yang kompeten • Persentase pengembangan kompetensi pegawai				√				√				√				√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
9	Organisasi yang fit for purpose																

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai hasil review pengelolaan kinerja • Indeks evektifitas pelaksanaan FGD pejabat administrator 				√				√				√				√
								√				√					√
		K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S	K	C	B	S
10	Pengelolaan keuangan yang optimal <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 				√				√		√						√
Hasil			1	2	15		-	2	16		1	1	16		-	1	17

Sumber : Data yang diolah, 2023

Dengan hasil data yang didapat bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2019 ada satu indikator kinerja yang tidak memenuhi target dan termasuk dalam kategori kurang yaitu persentase hasil lelang, dengan 2 indikator yang memenuhi kategori baik yaitu persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara dan persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN, selain itu terdapat 15 indikator yang melampaui target. Selanjutnya ditahun 2020 sudah tidak ada indikator kinerja yang tergolong dalam kategori kurang dan tidak memenuhi target, hanya ada rincian 2 indikator baik dan 16 lainnya yang termasuk dalam kategori sangat baik.

Tahun 2021 ada satu indikator kinerja yang tidak memenuhi target dan termasuk dalam kategori kurang yaitu kualitas pelaksanaan anggaran, selain itu ada

1 indikator yang memenuhi target dan tergolong baik yaitu persentase bidang tanah yang disertifikasikan, selanjutnya terdapat 16 indikator kinerja yang secara mulus dapat melampaui target dan tergolong dalam kategori sangat baik.

Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat baik bagi KPKNL Malang dimana hasil akuntabilitas kinerja mendapatkan hasil yang sangat mengesankan yaitu 17 indikator kinerja yang melampaui target dan hanya ada 1 indikator kinerja saja yang tergolong kategori baik.

4.2.2.1 Capaian Kinerja Hasil Lelang yang tidak tercapai tahun 2019-2022

Pada tahun 2019 persentase hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebesar 86,40%, dengan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa KPKNL Malang tidak dapat memenuhi target. Tidak tercapainya target hasil lelang pada tahun 2019 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih banyak dari satker-satker yang belum faham dan takut maupun merasa sulit untuk melakukan penghapusan aset negara maupun BMN yang sudah usang atau habis masa pakai kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, Selain itu penyebab tidak tercapainya hasil lelang pada tahun 2019 yaitu karena masih sedikitnya orang awam yang mengerti mengenai lelang karena ditahun tersebut sistem lelang masih sering menggunakan lelang offline atau lelang langsung karena sistem web yang masih belum sepenuhnya sempurna untuk digunakan ditambah masih sedikit juga sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai lelang, selain itu masih sedikitnya potensi lelang pada tahun tersebut yang berimbas pada tidak tercapainya target hasil lelang, ditambah dengan masih banyak aset yang gagal lelang ataupun tidak laku saat pelaksanaan lelang, hal ini

disebabkan karena masih sedikitnya peminat dari aset yang dilelang dan nilai limit yang tinggi juga tidak sesuai dengan nilai pasaran membuat calon peserta lelang berfikir ulang apakah aset yang ditawarkan *wort it* atau tidak untuk dibeli.

“Pada tahun tersebut masih sedikit potensi lelang yang ada dan ditambah keterbatasan pengetahuan untuk calon peserta lelang yang menyebabkan tidak tercapainya persentase hasil lelang pada tahun tersebut” (Wawancara 26 Mei 2023).

Peristiwa tersebut membuat beberapa tindakan maupun siasat untuk membuat target ditahun berikutnya bisa melampaui dan tidak seperti tahun sebelumnya. KPKNL Malang memakai banyak cara agar realisasi target hasil lelang dapat terpenuhi salahsatunya dengan cara melakukan sosialisasi terkait cara penghapusan maupun lelang BMN secara daring, selain itu mereka juga mendatangi langsung ke kantor satker-satker yang berpotensi untuk melakukan penghapusan maupun pelelangan BMN dan menghubungi pihak instansi maupun bank terkait yang asetnya dilelang untuk dapat mencari calon pembeli pada lelang aset negara tersebut.

Selanjutnya pada tahun 2020 persentase hasil lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang mengalami kenaikan dengan persentase sebesar 107,56% hasil tersebut dapat melampaui target dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kerja keras dan dengan banyak cara yang dilakukan oleh pegawai KPKNL Malang dan seksi lelang khususnya membuat target realisasi yang pada tahun sebelumnya tidak tercapai kini ditahun 2020 dapat tercapai. Pada tahun tersebut kondisi Negara Indonesia masih dalam masa pandemi Covid-19 akan tetapi tidak menghambat realisasi lelang pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang.

Persentase hasil lelang pada tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang mendapatkan angka sebesar 147,73%, dengan hasil tersebut maka dapat dikatakan melebihi target dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun tahun selanjutnya. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dan ditambah dengan kunjungan langsung ke kantor satker membuat para pelaku dari setiap satker faham dan mau untuk melakukan penghapusan maupun lelang aset maupun BMN yang sudah usang maupun habis masa pakai.

Tahun 2022 persentase hasil lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebesar 115,27% hal ini menunjukkan hasil yang positif dimana KPKNL Malang dapat melampaui target yang ada akan tetapi mengalami penurunan hasil realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.2.2.2 Capaian Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2019-2022

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Malang ditahun 2019 mencapai angka 109,09%, dimana hasil tersebut menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang berhasil untuk melampaui target, selanjutnya pada tahun 2020 persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Malang sebesar 101,37%, dimana angka tersebut sudah melampaui target yang ada tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2021 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Malang sebesar 99,63% (target tidak tercapai).

“Adanya kerancuan penerapan formulasi terbaru yaitu formulasi *smart* dari DJPb (Direktorat Jenderal Peraturan Pembendaharaan) dimana menghitung penggunaan dana dan efisiensi sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sebatas menghitung penggunaan dana saja yang membuat KPKNL Malang tidak bisa

maksimal dalam hasil yang didapat pada persentase kualitas pelaksanaan anggaran ditahun 2021” (Wawancara 26 Mei 2023).

Tahun 2022 persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Malang sebesar 100,38%, angka tersebut sudah melampaui target realisasi tahun sebelumnya namun mengalami penurunan dibanding 2-3 tahun kebelakang yakni pada tahun 2019 dan 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisikan hasil kinerja karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pula, hanya saja ada 2 indikator dalam kurun waktu 4 tahun kebelakang yang tidak memenuhi target diantaranya yaitu persentase hasil lelang dan kualitas pelaksanaan anggaran. Pada persentase hasil lelang tidak dapat memenuhi target pada tahun 2019 karena masih sedikitnya potensi lelang pada tahun tersebut karena ketidaktahuan calon peserta lelang (orang awam) yang tau akan lelang di KPKNL yang berimbas pada tidak tercapainya target hasil lelang, selain itu juga masih banyak aset yang gagal lelang ataupun tidak laku saat pelaksanaan lelang yang disebabkan karena tingginya nilai limit aset yang ditawarkan membuat calon konsumen enggan untuk memberikan penawaran pada aset.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya konsistensi akan hasil akuntabilitas kinerja yang dicapai dari tahun ke tahun yang diharapkan dapat selalu naik dan tidak ada indikator yang

mendapatkan hasil rendah/tidak memenuhi target karena akan mempengaruhi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

2. Pelunya sosialisasi dengan masyarakat luas terkait lelang yang diselenggarakan KPKNL melalui web lelang.go.id karena masih banyak masyarakat yang belum tau dan mengerti cara maupun mekanisme keikutsertaan dalam lelang yang dilakukan oleh KPKNL.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Dr. H. Zuchri. 2021. *Metode Penelotohan Kualitatif*. ed. M.Si Dr. Patta Rapanna, SE. Makasar: Syakir Media Press.
- Budiyanto, Eko, and Mochamad Mochklas. 2020. *Evaluasi Kinerja SDM Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Aspek Gaya Kepemimpinan Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja*.
- Chintia Pristiyanti, Dita. 2016. "Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Mayer Sukses Jaya." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)* 4(1): 173–83.
- Haryanto, Sahnuddin, and Arifuddin. 2007. "Akutansi Sektor Publik." *Perpustakaan Nasional*: 3–251.
- Haryoko M.Pd., Prof. Dr. Sapto. 2020. *Analisa Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis)*. <http://eprints.unm.ac.id/20838/>.
- Hidayat, Indra Muhammad Syarief, Della Nurseptiani, and Faisal Faisal. 2021. "Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur." *Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1(1): 1.
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. 3rd ed. ed. Bastian Indra. Jakarta: Erlangga.
- Khasanah, Umrotul, Meldona Meldona, and Muhammad Djakfar. 2020. "Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku Umkm." *El Dinar* 8(2): 115–29.
- Lestari, Iin Fitri, and Ulfi Kartika Oktaviana. 2020. "PERANAN KOMITE AUDIT DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada BPRS Di Jawa Timur)." *El Dinar* 8(1): 29.
- Madjid, Jamaludin. 2019. Yogyakarta *Akuntansi Sekor Publik*. http://www.academia.edu/download/54793453/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Dana_Umum_Genera.docx.
- Manggaukang Raba. "AKUNTABILITAS Konsep Dan Implementasi." *UMM Press*.
<https://books.google.co.id/books?id=UKLzDwAAQBAJ&lpg=PR2&hl=id&pg=PA34#v=onepage&q&f=false>.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Meidina, Erlynda. 2018. "Pengaruh Implementasi Good Government Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada SKPD Di Kabupaten Bandung Barat)."

Institutional Repositories & Scientis Joournals (i): 16–45.

- Nur Asnawi a, Nina Dwi Setyaningsih. 2021. “ISLAMIC BANKING SERVICE INNOVATION IN CUSTOMER CO CREATION: ITS IMPACT ON CUSTOMER TRUST, SATISFACTION, AND LOYALTY.” *MIS Quarterly* 39(1): 1–6.
- Padia Aulia Hadiyanti. 2017. “ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA KABUPATEN OKU TIMUR.”
- Putra, Yuniarti, Sri Yati, and Nanik Wahyuni. 2015. “Acting Green: Theoretical Framework on Corporate Social Responsibility.” *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 9(7): 248–50.
- Qodrunnada, Kholida. 2021. “Good Governance : Pengertian Dan Prinsip-Prinsipnya.” <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya>.
- Rahmadi. 2011. Antasari Press *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Rifda Arum. “Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, Dan Mekanisme.” 2021. <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-akuntabilitas/> (December 27, 2022).
- Rijali, Ahmad. 2019. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17(33): 81.
- Risky Jaka Perdana, and Arya Wiguna. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik Siklus Pengukuran Kinerja Sektor Publik 3 . Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja.”
- Rochayatun, Sulis, Heri Pratikto, Cipto Wardoyo, and Puji Handayati. 2023. “Assessing the Relevance of Spirituality and Corporate Social Responsibility in A Family Business : A Scooping Review.” 9(April).
- Safitri, Rini, and Feri Dwi Riyanto Indah Yuliana. 2020. “The Influence Brand Identity, Brand Leadership, and Brand Communication toward Job Satisfaction.” *A R T I C L E Asia-Pacific Management and Business Application* 9(1): 57–66. <http://apmba.ub.ac.id>.
- Siswanto et al. 2022. “Impact of Work-Family Conflict on Job Satisfaction and Job Stress: Mediation Model From Indonesia.” *Problems and Perspectives in Management* 20(2): 44–56.
- Sudaryanti, Dwiyani. 2011. “Akuntansi Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi Di Indonesia.” *Tera Ilmu Akuntansi* 10(1): 58–76.
- Tsauri, Sofyan. 2014. STAIN Jember Press *MANAJEMEN KINERJA Performance Management*.
- Unrinews. “Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022, Pola Baru Untuk ASNle.” 20

Sep 2022. <https://unri.ac.id/permenpan-rb-nomor-6-tahun-2022-pola-baru-untuk-asn/>.

- Wahyuni, Nanik, and Boge Triatmanto. 2020. "The Effect of the Organizational Change on Company Performance Mediated by Changes in Management Accounting Practices." *Accounting* 6(4): 581–88.
- Wahyuni, Nanik, and Novi Lailiyul Wafiroh. 2023. "GOOD CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURES AND FINANCIAL PERFORMANCE: ISLAMIC SOCIAL REPORTING AND ZAKAH DISCLOSURES AS MEDIATING." 11(1): 18–34.
- Warsini, Kusni. 2009. "ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2007 (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo)." 2007: 12–42.
- Yustyarani, Windie. 2020. "Influence Of Intellectual Capital, Income Diversification on Firm Value Of Companies With Profitability Mediation: Indonesian Banking." *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 12(2): 211.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis

Informasi Pribadi

Nama : Andre Erlangga Tri Rohmansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 20 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Dsn. Kedepok Rt.02 Rw.05 Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi
Kab. Lamongan Jawa Timur
Alamat Tinggal : Joyosuko Metro 30 Nomor 41H2 Rt.02 Rw.12 Merjosari
Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur
Nomor HP : 081326693602
Email : andresnedi@gmail.com

Pendidikan Formal

2007 – 2013 : SDN 2 Sumberaji
2013 – 2016 : SMPN 1 Sukodadi
2016 – 2019 : SMA Panca Marga 1 Lamongan
2019 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2019 – 2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Malang
2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)

Pengalaman Organisasi

2019 – 2020 : Anggota PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta UIN Malang
2019 – 2022 : Pengurus Pencak Silat PSHT Komisariat UIN Malang
2020 – 2022 : Pengurus PMII Rayon Ekonomi Moch. Hatta UIN Malang
2020 – 2022 : Pengurus Tax Center UIN Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Accurate basic level Akuntansi Tahun 2022
- Peserta Pelatihan Atlas Akuntansi UIN Malang Tahun 2022
- Peserta Pelatihan SPSS di Fakultas Ekonomi tahun 2022
- Peserta Pelatihan E-SPT PPh 21 di Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2021
- Panitia Pelatihan E-SPT PPh 21 di Fakultas Ekonomi UIN Malang Tahun 2022
- Peserta Pelatihan dan Sertifikasi PPh 21 Fakultas Ekonomi Tahun 2021
- Panitia Pelatihan dan Sertifikasi PPh 21 Fakultas Ekonomi Tahun 2022
- Peserta Pelatihan Kepenulisan Artikel Tahun 2022
- Peserta Pelatihan Pembuatan CV Fakultas Ekonomi Tahun 2022
- Panitia Iconies 8th UIN Malang tahun 2022
- Peserta Pelatihan Penulisan Essai tahun 2022

Malang, 26 Juni 2023

Andre Erlangga Tri R.

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal wawancara : 26 Mei 2023

Tempat/ Waktu : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Narasumber 1 : Bu Firda (Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal)

Pertanyaan :

1. Didalam melakukan penyusunan LAKIP perlu memperhatikan kualitas kinerja, lalu bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai hal tersebut!

Jawab:

“Lakip juga perlu memerhatikan kualitas kinerja karena semua output melihat kualitas kinerja, pada KPKNL kualitas kinerja tercermin dari NKO atau nilai kinerja organisasi.”

2. Apakah LAKIP dilakukan pemeriksaan dan penilaian dari pihak berwenang? Atau hanya sebatas formalitas saja?

Jawab:

“Untuk pemeriksaan biasanya dilakukan oleh kanwil DJKN yang dilakukan secara berkala tiap tahun yaitu dari bidang KIHI (kepatuhan internal dan hukum informasi) sedangkan untuk penilaian hanya dari ketepatan waktu pembuatan dan pengumpulan lakip saja.”

3. Jika ada, bagian apa saja yang dilakukan pemeriksaan dan penilaian? (Mengacu dari soal nomor 2)

Jawab:

“Untuk bagian yang dilakukan pemeriksaan itu semua indikator kinerja karyawan yang ada dan juga hasil apakah sudah baik atau masih ada yang perlu peningkatan kedepannya.”

4. Misalkan hasil LAKIP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, apa tindakan dan sikap yang dilakukan oleh KPKNL Malang.

Jawab:

“Jika hasil lakip mengalami penurunan maka biasanya dijelaskan apa sih penyebabnya dan biasanya turun waktu adanya pandemi covid-19 dimana pada

saat itu ada pembatasan berinteraksi antar sesama. Selain itu KPKNL juga melakukan evaluasi untuk tahun berikutnya agar hasil yang didapat lebih baik.”

5. Pada tahun 2019 persentase hasil lelang pada KPKNL Malang sebesar 86,40% (target tidak tercapai), apa sih penyebab dari tidak tercapainya target tersebut?

Jawab:

“Pada tahun tersebut masih sedikit potensi lelang yang ada dan ditambah keterbatasan pengetahuan untuk calon peserta lelang yang menyebabkan tidak tercapainya persentase hasil lelang pada tahun tersebut.”

6. Pada tahun 2021 persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada KPKNL Malang sebesar 99,63% (target tidak tercapai), apa sih penyebab dari tidak tercapainya target tersebut?

Jawab:

“Adanya kerancuan penerapan formulasi terbaru yaitu formulasi *smart* dari DJPb (Direktorat Jenderal Peraturan Pembendaharaan) dimana menghitung penggunaan dana dan efisiensi sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sebatas menghitung penggunaan dana saja yang membuat KPKNL Malang tidak bisa maksimal dalam hasil yang didapat pada persentase kualitas pelaksanaan anggaran ditahun 2021.”

7. Hasil kinerja setiap tahun dapat melampaui target hanya saja tiap tahunnya juga mengalami penurunan, apa pendapat ibu mengenai kasus tersebut!

Jawab:

“Dari kantor sendiri biasanya melakukan monitoring dan mencari tau permasalahan yang ada dan segera mungkin untuk memunculkan solusi agar kedepannya bisa lebih baik.”

8. Pada saat pandemi covid-19 apakah menghambat kinerja dari pegawai kpknl yang berpengaruh pada hasil kinerja mereka?

Jawab:

“Pandemi covid-19 menghambat kinerja dari pegawai kpknl karena pada saat itu semua pekerjaan dilakukan dengan daring saja dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan para satker dan hal hal tersebut yang menyebabkan hasil kinerja dapat turun.”

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal wawancara : 26 Mei 2023

Tempat/ Waktu : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Narasumber 2 dan 3 : Bu Nova dan Pak Satria (Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi)

Pertanyaan:

1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIP?

Jawab:

“Untuk waktu yang dibutuhkan sendiri melihat dari data yang terkumpul dari semua seksi yang ada pada KPKNL, biasanya kami melakukan penyusunan kurang lebih 1 bulan dan bisa dikirimkan kepada kanwil untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian.”

2. Apakah ada hambatan dalam pembuatan LAKIP?

Jawab:

“Untuk hambatan dalam pembuatan LAKIP sepertinya tidak ada, hanya saja beberapa kali terjadi keterlambatan waktu dari beberapa seksi dalam menyerahkan data penilaian yang membuat semakin lama untuk pembuatan lakip.”

3. Apakah LAKIP dilakukan pemeriksaan dan penilaian dari pihak berwenang? Atau hanya sebatas formalitas saja?

Jawab:

“Untuk pemeriksaan biasanya dilakukan oleh kanwil DJKN yang dilakukan secara berkala tiap tahun yaitu dari bidang KIHI (kepatuhan internal dan hukum informasi) sedangkan untuk penilaian hanya dari ketepatan waktu pembuatan dan pengumpulan lakip saja.”

4. Jika ada, bagian apa saja yang dilakukan pemeriksaan dan penilaian? (Mengacu dari soal nomor 5)

Jawab:

“Untuk bagian yang dilakukan pemeriksaan itu semua indikator kinerja karyawan yang ada dan juga hasil apakah sudah baik atau masih ada yang perlu peningkatan kedepannya.”

TRANSKRIP WAWANCARA

Tanggal wawancara : 26 Mei 2023

Tempat/ Waktu : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang

Narasumber 4 : Kepala Kantor KPKNL Malang

Pertanyaan :

1. Apakah LAKIP dilakukan pemeriksaan dan penilaian dari pihak berwenang? Atau hanya sebatas formalitas saja?

Jawab:

“Lakip pasti ada pemeriksaan dan penilaian, untuk pemeriksaan sendiri dilakukan oleh kantor wilayah yang ditugaskan khusus untuk memeriksa lakip instansi pemerintahan, Sedangkan untuk penilaian biasanya dari ketepatan waktu pengumpulan lakip pada kantor wilayah.”

2. Jika ada, bagian apa saja yang dilakukan pemeriksaan dan penilaian? (Mengacu dari soal nomor 5)

Jawab:

“Untuk bagian yang dilakukan pemeriksaan dan penilaian terdiri dari 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja sedangkan komponen kedua, yaitu pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran.”

3. Misalkan hasil LAKIP mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, apa tindakan dan sikap yang dilakukan oleh KPKNL Malang.

Jawab:

“Dari KPKNL sendiri biasanya melakukan evaluasi untuk mencari permasalahan kenapa itu bisa terjadi, dan selanjutnya bisa dijelaskan apa penyebab dan permasalahan yang ada sehingga indikatornya mengalami penurunan.

4. Bagaimana cara agar hasil kinerja setiap tahunnya tidak mengalami fluktuatif?

Jawab:

“KPKNL Malang sebisa mungkin untuk selalu meningkatkan kualitas kinerjanya agar lakip kpknl setiap tahunnya bisa terjaga dan tidak mengalami penurunan.”

5. Capaian kineja KPKNL Malang setiap tahunnya dapat dikatakan baik, bagaimana tips maupun cara agar hasil capaian setiap tahunnya dapat selalu stabil bahkan meningkat?

Jawab:

“Sering melakukan evaluasi secara berkala setiap minggu mengenai kinerja yang telah dilakukan dan mencari solusi akan permasalahan yang ada agar segera bisa teratasi.”

6. Apakah hasil LAKIP tersebut sudah benar dan sesuai hasil yang ada pada lapangan tanpa adanya manipulasi data?

Jawab:

“Sejauh ini saya melihat tidak ada kecurangan atau manipulasi data maupun apapun mengenai hasil LAKIP yang ada karena pada dasarnya karyawan KPKNL Malang mengutamakan hasil kinerja dan berperilaku jujur.”

Lampiran 3 Dokumentasi



Lampiran 4 Hasil Turnitin

6/10/23, 12:35 PM Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
NIP : 197612102009122001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Andre Erlangga Tri Rohmansyah
NIM : 19520102
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : **Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sesuai Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
17%	17%	3%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Malang, 10 Juni 2023
UP2M

Zuraidah, M.S.A

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/public/print/plagiasi/6353/111> 1/1

Lampiran 5 Jurnal Bimbingan Skripsi

6/16/23, 2:07 AM Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:
 NIM : 19520102
 Nama : Andre Erlangga Tri Rohmansyah
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A
 Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SESUAI PERMEN PAN-RB NOMOR 6 TAHUN 2022 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang)

JURNAL BIMBINGAN :


No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	21 Oktober 2022	Bimbingan online via zoom meeting untuk membahas rencana judul penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
2	11 November 2022	Revisi mengenai peraturan yang dipakai dalam penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
3	29 November 2022	Bimbingan online membahas mengenai bab latar belakang sampai tujuan penelitian	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
4	23 Desember 2022	Bimbingan online membahas kajian teori dan penelitian terdahulu yang digunakan	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
5	2 Februari 2023	Bimbingan bab 3	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
6	11 Februari 2023	ACC untuk seminar proposal / sempro	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	28 Februari 2023	Konsultasi sebelum sempro	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	17 April 2023	Revisi setelah sempro	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	15 Mei 2023	Konsultasi mengenai pemilihan metode penelitian yang diubah	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	22 Mei 2023	Revisi mengenai Bab 3 dan pembahasan	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	26 Mei 2023	Konsultasi Pembahasan dan tata cara penulisan	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/public/print/bimbingan/529> 1/2

6/16/23, 2:07 AM Print Jurnal Bimbingan Skripsi

12	31 Mei 2023	Konsultasi mengenai hasil penelitian di bab 4 dan menghapus beberapa sub bab yang dianggap tidak perlu	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
13	1 Juni 2023	ACC untuk sidang skripsi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi



Malang, 1 Juni 2023
 Dosen Pembimbing



Yona Octiani Lestari, SE., M.S.A

<https://access.fe.uin-malang.ac.id/public/print/bimbingan/529> 2/2

Lampiran 6 Surat Keterangan Survey/Riset/PKL

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG <small>Jalan S. Sugiyadi Nomor 197, Malang 65139 Telepon: (0341) 854475, 854588; Faksimili: (0341) 854473 email : kpkmlmalang@kemkeu.go.id situs : http://www.djkn.kemkeu.go.id/kpkml-malang</small>								
Nomor : S-3/KNL.100301/2023	21 Juni 2023								
Sifat : Biasa									
Lampiran : -									
Hal : Surat Keterangan Survei/Riset/PKL									
Yth. Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Malang									
Yang bertanda tangan di bawah ini,									
Nama : Yanto Hariadi, S.E.									
NIP : 197912142001121002									
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d									
jabatan : Kepala Subbagian Umum									
Menerangkan bahwa mahasiswa/mahasiswi di bawah ini :									
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>Nama</th><th>NIM</th><th>Universitas</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Andre Erlangga Tri Rohmansyah</td><td>19520102</td><td>Universitas Islam Negeri Malang</td></tr></tbody></table>	NO	Nama	NIM	Universitas	1.	Andre Erlangga Tri Rohmansyah	19520102	Universitas Islam Negeri Malang	
NO	Nama	NIM	Universitas						
1.	Andre Erlangga Tri Rohmansyah	19520102	Universitas Islam Negeri Malang						
Telah melaksanakan Survei/Riset/Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang pada Tanggal 30 Juli 2022 – 30 September 2022.									
KPKNL Malang selalu memberikan layanan berintegritas di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang dengan semangat MBOIS (Maju untuk memberikan layanan terbaik, BOnafide dengan layanan yang tepercaya, dan IStimewa bagi seluruh pengguna layanan).									
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya									
Kepala Subbagian Umum									
									
Ditandatangani secara elektronik Yanto Hariadi, S.E									
<small>Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://ns.keminfo.go.id/verifyPDF</small>									